



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH



2024-2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si

NIP : 19661129 199203 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Berdasar SK Gubernur

Nomor : 821.2/186/2019

Tanggal : 6 Mei 2019

Bertugas untuk dan atas nama Dinas PU Bina Marga dan Cipta

Karya Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2023

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

DAFTAR ISI

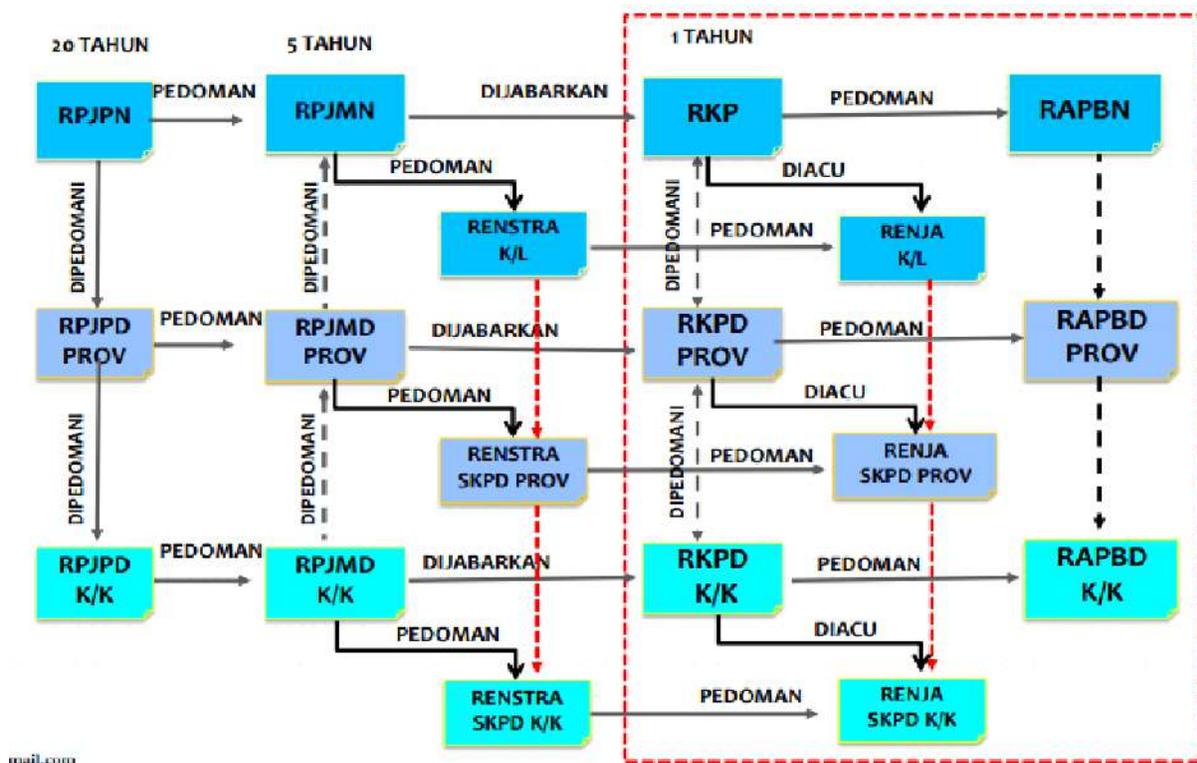
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	4
1.3.Maksud Dan Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.....	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	52
3.2. Isu Strategis.....	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah.....	70
4.2. Manajemen Risiko Strategis DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	76
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP.....	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan bernegara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPN/RPJD), jangka menengah (RPJMN/RPJMD/RENSTRA), dan tahunan (RKPD/RENJA) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Pada tahun 2023 merupakan masa berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur, maka berakhir pula dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) periode 2018-2023. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

dilakukan secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024. Sehingga mulai pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah tidak akan memiliki Gubernur definitif dan akan digantikan oleh Pj. Gubernur serta pada tahun 2024 tidak akan memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan terpilihnya Gubernur yang baru melalui pemilihan kepala daerah serentak.

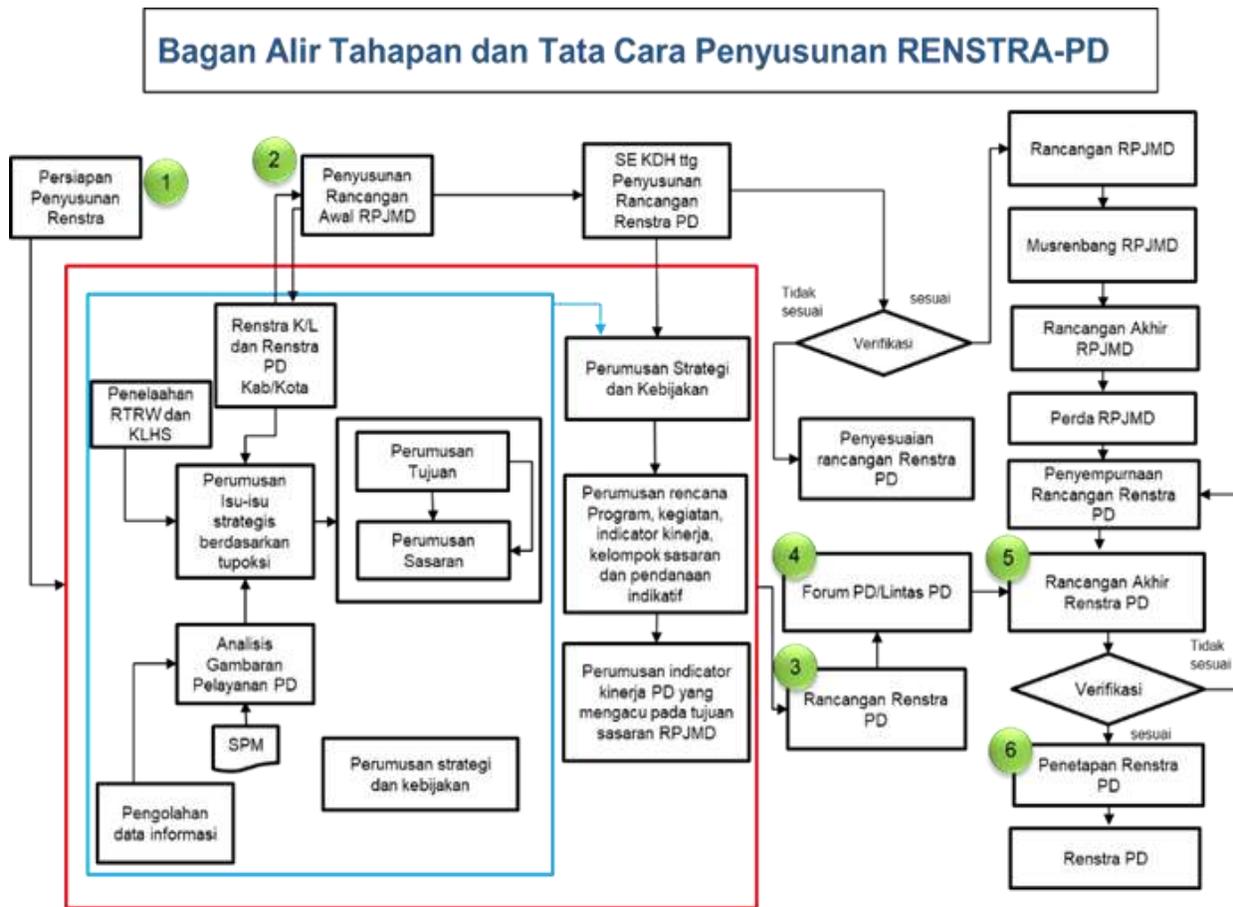
Terhadap kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dimaksud telah diterbitkan Inmendagri No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa diamanatkan para Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, perlu segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun Renstra tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman kepada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.

Fungsi Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja (Renja) kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap. Dokumen Renstra tersebut bersifat transisi dan bernuansa teknokratik sampai dengan terpilihnya kepala daerah terpilih dan definitif, yang digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk memastikan fungsi pelayanan umum pembangunan tetap berjalan dengan baik.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan Renstra PD.

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Renstra



Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan RPJMD antara lain : meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung konektivitas hasil pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Semarang-Demak, Bawen-Yogyakarta; meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan; meningkatkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang bersertifikat dan pelayanan informasi konstruksi guna meningkatkan daya saing serta pengembangan wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mewujudkan Renstra Tahun 2024 - 2026 secara bertahap dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut yang dituangkan melalui program diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menjabarkan program dan

kegiatan tersebut ke dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang – Undang RI No 2 tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;
4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
23. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan);
25. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (tgl 5 Oktober 2020);
26. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
29. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
30. Peraturan daerah Provisi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
31. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
32. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
33. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; dan

36. Keputusan Gubernur Nomor 622/2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud :

Sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan periode 2024-2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dalam Renstra, Substansi Umum serta Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang didasarkan pada RPD tahun 2024-2026 dan Norma, standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah. Cascading kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memuat tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.3. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- b. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;

- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan :
 - Seksi Rancang Bangun;
 - Seksi Pengawasan Teknis;
 - Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan.
- d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan :
 - Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;
 - Seksi Pelaksana Jalan Timur 2;
 - Seksi Administrasi Teknis Timur.
- e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, membawahkan :
 - Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;
 - Seksi Pelaksana Jalan Barat 2;
 - Seksi Administrasi Teknis Barat.

f. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, membawahkan:

- Seksi Pengembangan Air Minum;
- Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;
- Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.

g. Balai Pengelolaan Jalan, membawahkan :

- Subbagian Tata Usaha
- Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1
- Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2

Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

h. Balai Pengujian dan Peralatan, membawahkan :

- Subbagian Tata Usaha;
- Seksi Pengujian Mutu;
- Seksi Peralatan dan Alat Berat

Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelaksanaan pengujian dan pengelolaan peralatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

i. Balai Jasa Konstruksi, membawahkan :

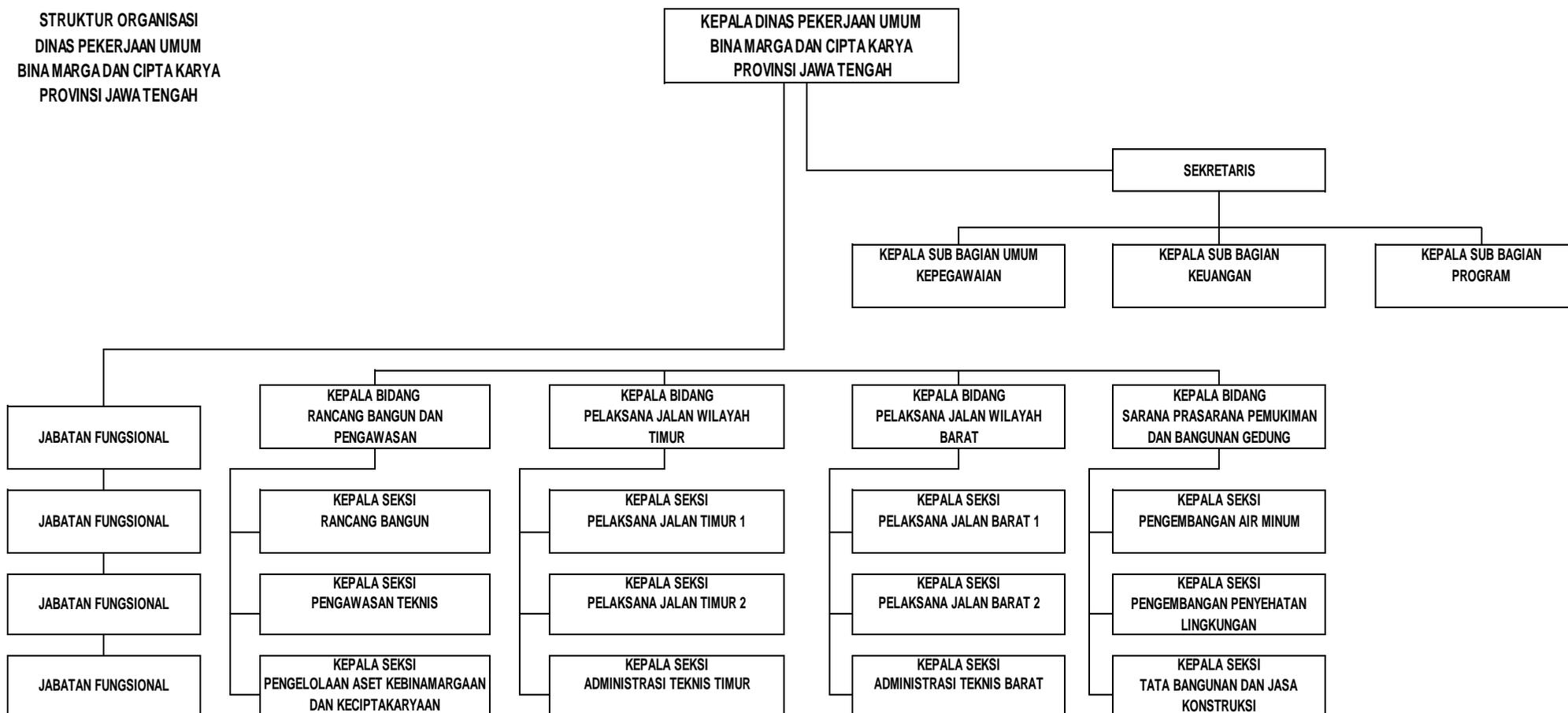
- Subbagian Tata Usaha;

Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

j. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA WILAYAH



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

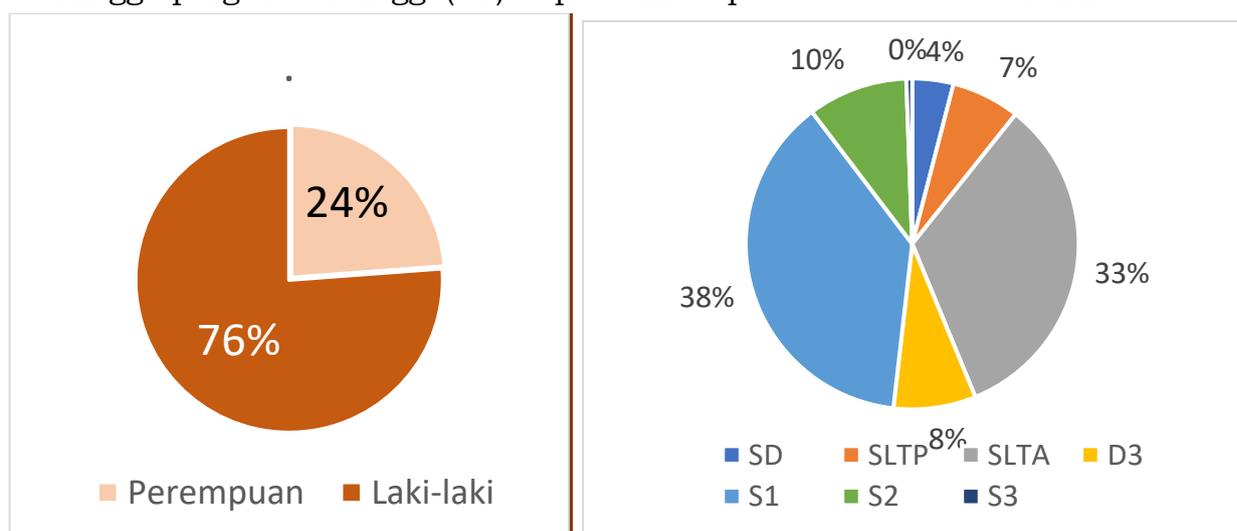
2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan Jalan, air minum, sanitasi, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Dinas teknis. Sumber daya Dinas PUBMCK terdiri dari Sumber daya manusia dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pekerjaan umum.

2.2.1 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

SDM di PUBMCK tersebar di kantor pusat di Dinas PUBMCK dan 11 balai-balai yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Sumber daya manusia akan terlihat komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai teknis. Pada Desember 2022 jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebanyak 525 aparatur yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Adapun kondisi aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa tengah berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 400 orang dan perempuan sebanyak 125 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

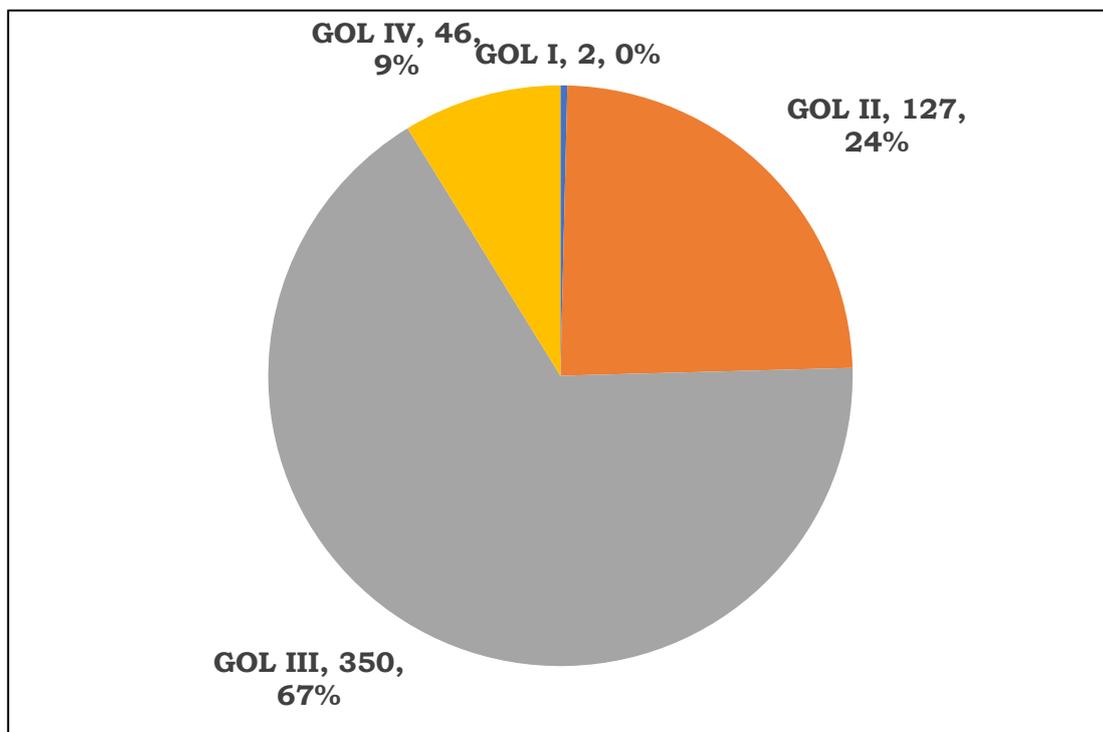


Gambar 2.3 Persentase Pegawai Berdasar Jenis Kelamin dan Pendidikan

Sumber: Sekertaris DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah

Kemudian dilihat persentase pegawai berdasarkan golongan di **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa tengah** golongan III mendominasi jumlah terbanyak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Cipta Karya di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 350 orang, sebagaimana tampak pada tabel berikut.



Gambar 2.4 Persentase Pegawai Berdasar Golongan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa tengah Per Desember 2022

Sumber: Sekertaris DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah, Des 2022

2.2.2 Asset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa tengah. Sarana dan prasarana tersebut terbagi dalam setiap unit wilayah sebagai berikut:

- a. Asset Peralatan Utama

Aset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN
Tanah	4.166	Bidang
Alat-alat Besar	655	Unit
Alat-alat Angkutan	239	Unit
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	16	Unit

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN
Alat-alat Pertanian	8	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.219	Unit
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	112	Unit
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	-	
Alat Laboratorium	425	Unit
Alat Keamanan	5	Unit
Alat Komputer	608	Unit
Peralatan Olah Raga	1	Unit
Bangunan Gedung	156	Unit
Monumen	1	Unit
Jalan dan Jembatan	2.009	Unit
Bangunan Air	2.717	Unit
Instalasi	2	Unit
Jaringan	1	Unit
Bahan Perpustakaan	2.088	Unit
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah raga	13	Unit
Hewan	-	
Konstruksi dalam pengerjaan	51	Unit

b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor

Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

NO	Kantor	Gedung Kantor		Rumah Negara		Gudang		Tempat Ibadah		Pos Jaga		Garasi		Tempat Pertemuan		Olah Raga	
		Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²	Jumlah	M ²
1	Kantor Pusat	3	4.441	5	350	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-
2	BPJ Tegal	12	1.394	9	1.712	1	80	-	-	-	-	1	200	1	200	1	140
3	BPJ Pekalongan	13	2.780	1	53	1	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPJ Cilacap	7	13.609	2	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPJ Semarang	7	1.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPJ Magelang	9	1.762	5	391	5	619	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPJ Wonosobo	6	1.481	-	-	-	-	-	-	2	64	-	-	-	-	-	-
8	BPJ Pati	13	1.625	1	251	1	98	2	94	1	9	1	108	-	-	-	-
9	BPJ Purwodadi	12	2.047	7	759	1	48	2	64	-	-	2	414	3	416	1	292
10	BPJ Surakarta	12	1.556	2	126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	242	-	-
11	Balai Pengujian dan Peralatan	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Balai Jasa Konstruksi	1	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

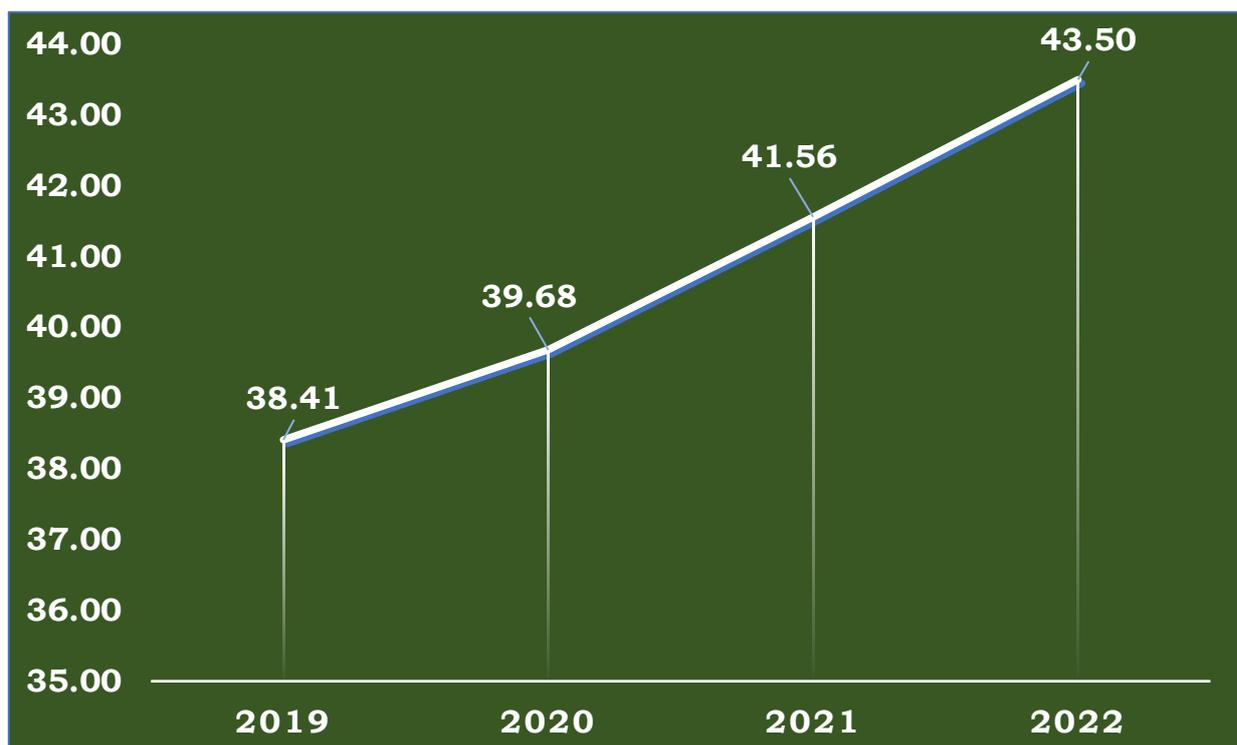
Selama periode tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target-target pembangunan di urusan pekerjaan umum terutama di bidang bidang marga dan cipta karya. Sehingga dalam melakukan penilaian keberhasilan di dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dapat dilihat dari capaian kinerja selama lima tahun sebelumnya.

2.3.1. Gambaran Pelayanan Bina Marga

Lingkup pelayanan bina marga adalah penyelenggaraan jalan dan jembatan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Tengah, serta pelengkap jalan seperti saluran drainase, dinding penahan tanah, dan bahu jalan. Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.165,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,73 %;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,39%;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,88 %.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2021 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 999,483 km atau 41,56 persen dan meningkat di tahun 2022 sebesar 43,50%, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

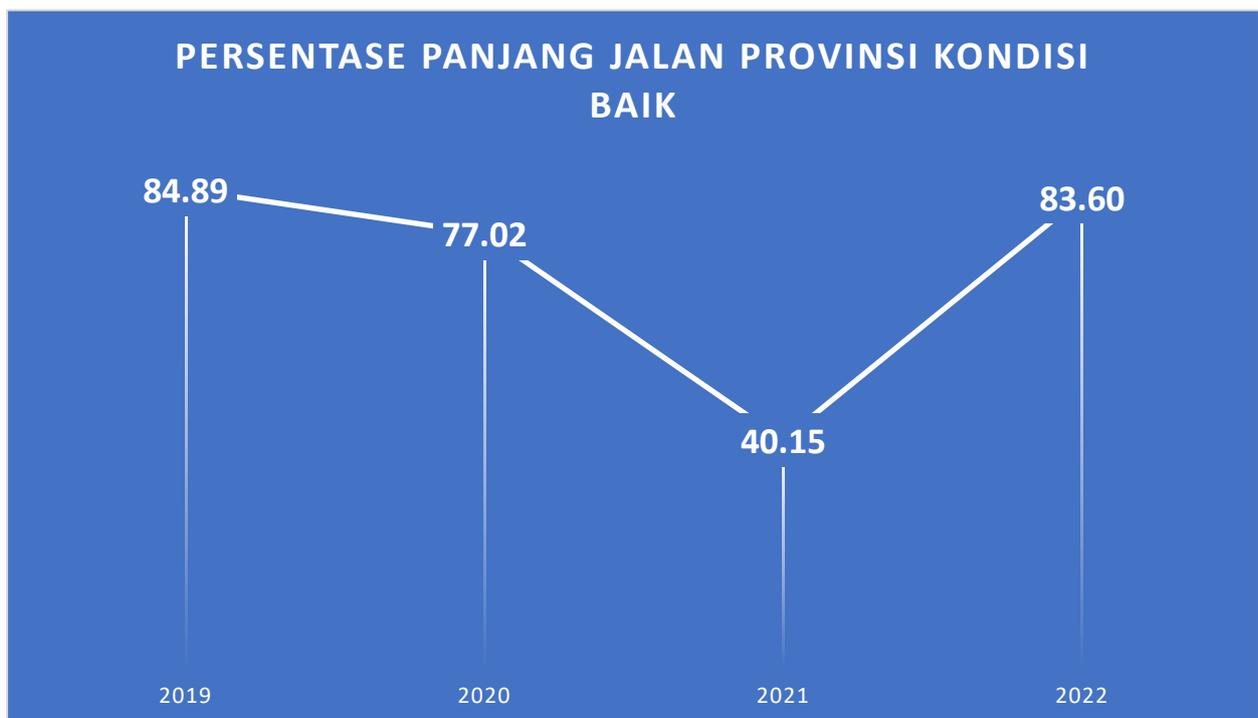


Gambar 2.5 Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan). Sampai dengan tahun 2021, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥ 7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 999,483 km atau mencapai 41,56 persen. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 772,107 km atau mencapai 32,10 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi permukaan jalan baik pada tahun 2019 sebesar 84,89% mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 83,60%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



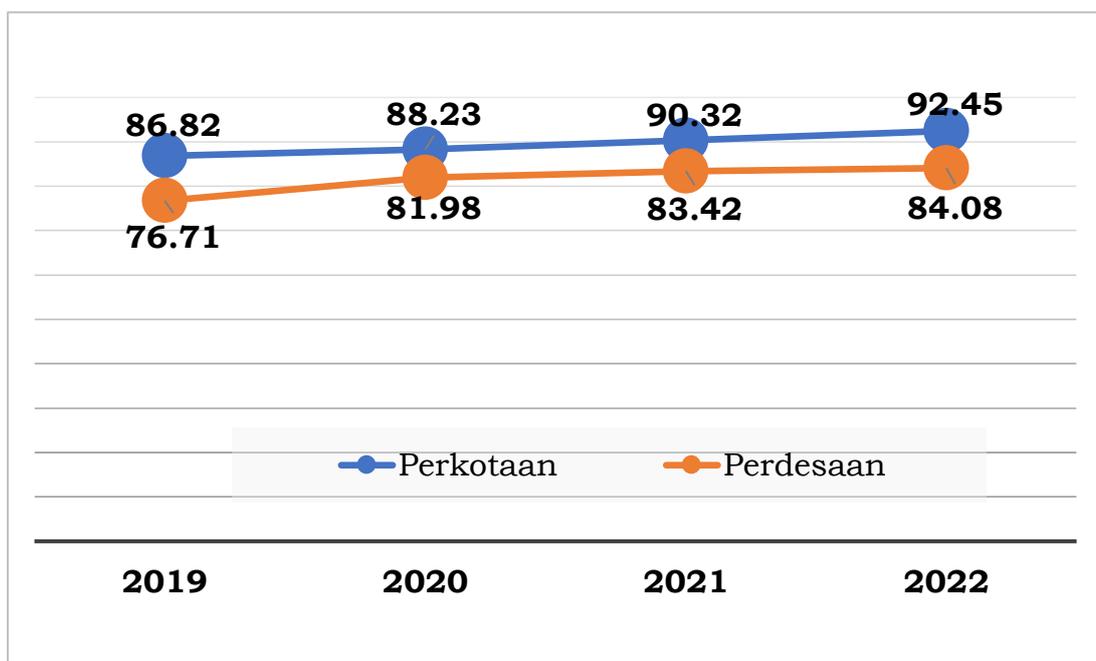
Gambar 2.6 Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan dan Bangunan Pelengkap Baik serta Persentase Panjang Jembatan Kondisi Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.3.2. Gambaran Pelayanan Cipta Karya

Ruang lingkup pelayanan cipta karya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum antara lain air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.

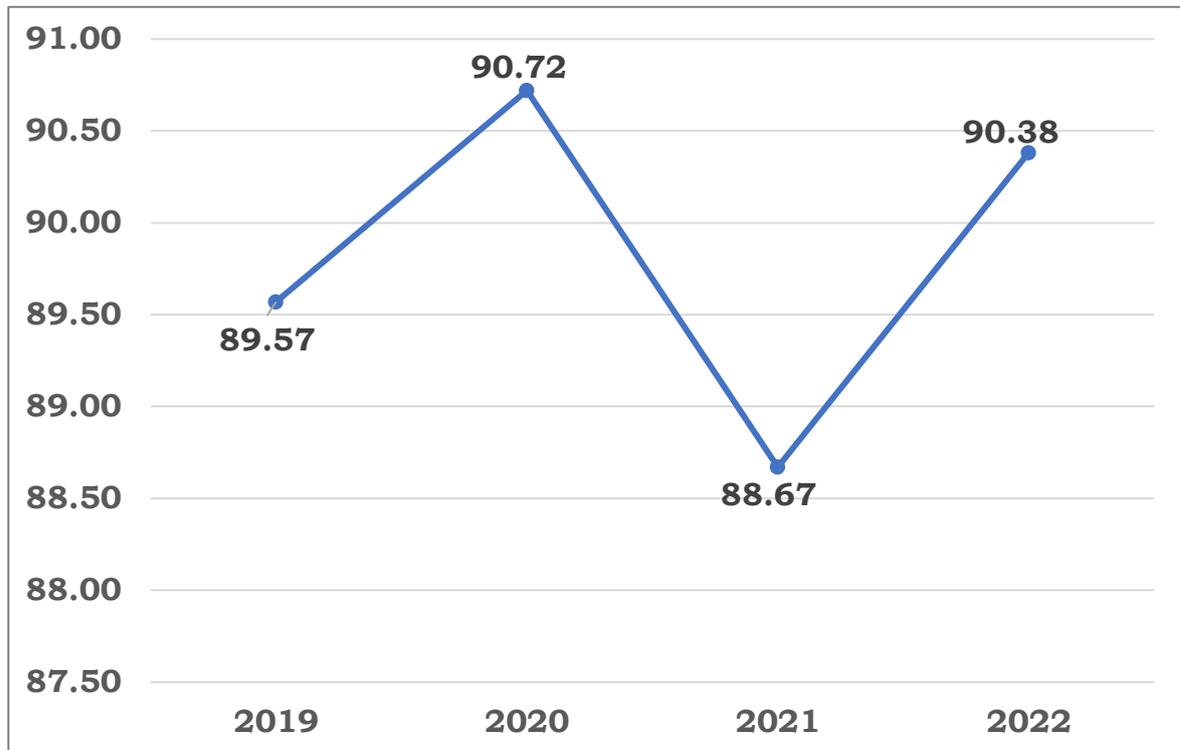
Cakupan akses layanan air minum layak pada tahun 2022 di perkotaan sebedar sebesar 92,45 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 90,32 persen. Sedangkan Cakupan akses layanan air minum layak pada tahun 2022 di pedesaan sebesar sebesar 84,08 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 83,42 persen.



Gambar 2.7 Persentase Akses Layanan Air Minum Layak

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Cakupan akses layanan air limbah domestik layak pada tahun 2022 sebesar 90,38 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 88,67 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses layanan air limbah domestik aman pada tahun 2022 sebesar 9,94 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,75 persen dikarenakan terjadi kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan tidak ada pembangunan baru.



Gambar 2.8 Persentase Akses Sanitasi Air Limbah Domestik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.3.3. Evaluasi Renstra 2018 – 2023

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 622/2/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, panjang Jalan Provinsi sepanjang 2.440,12 km. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021 dalam kondisi baik 40,15% atau 965,605 km, sedang 50,71% atau 219,454 km, rusak ringan 9,14% atau 219,682 km dan rusak berat 0% atau 0 km menggunakan metode *Surface Distress Index* (SDI). Sedangkan kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022 dalam kondisi baik 83,60% atau 2.010,27 km, sedang 8,89% atau 213,89 km, rusak ringan 2,84 atau 68,83 km dan rusak berat 4,67% atau 112,25 km menggunakan metode *Treatment Trigger Index* (TTI). Dalam dua tahun terakhir ruas jalan dalam kondisis baik meningkat, namun jalan dalam kondisi rusak berat juga meningkat.

Berdasarkan evaluasi 12 indikator ini secara keseluruhan dapat tercapai, hasilnya dapat dicermati pada Tabel 2.1, sedang untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat dicermati pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A 1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor																			
1	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%				37,91	39,16	41,12	42,97	44,39	38,41	39,68	41,56	43,50	44,70	101,32	101,33	101,07	101,23	100,70
B 1.1	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor																			
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%				37,91	39,16	41,12	42,97	44,39	38,41	39,68	41,56	43,50	44,70	101,32	101,33	101,07	101,23	100,70
C 1.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan																			
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%				35,65	36,48	38,00	40,98	42,67	36,06	37,16	38,98	40,78	42,16	101,15	101,86	102,58	99,51	98,80
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%				40,18	41,84	44,24	44,93	46,03	40,79	42,27	44,22	46,32	47,47	101,52	101,03	99,95	103,09	103,13
3	Persentase panjang jalan yang dileger	%				96,30	97,05	98,43	99,71	100,00	96,30	96,30	97,59	99,71	100,00	100,00	99,23	99,15	100,00	100,00
4	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00	100,00	100,00
5	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%				93,05	94,62	95,33	82,11	100,00	93,05	93,05	57,06	85,33	100,00	100,00	98,34	59,86	103,92	100,00
6	Persentase pengendalian mutu	%				69,99	77,50	85,00	88,61	100,00	69,99	90,56	92,80	114,86	100,00	100,00	116,85	109,18	129,62	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pelaksanaan jasa konstruksi																			
7	Persentase perencanaan, pengawasan dan pengadaan lahan yang terlaksana	%				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	83,33	100,00	0,00	0,00	0,00	83,33	100,00
B 1.2	Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik.	%				90,20	90,80	91,50	91,60	92,10	90,69	90,73	90,86	92,49	95,30	100,54	99,92	99,30	100,97	103,47
	Rasio kemantapan jalan	%		92,10																
C 1.2.1	Program Penyelenggaraan Jalan																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%				87,12	87,23	87,72	87,67	88,02	87,13	87,14	95,39	93,63	96,46	100,01	99,90	108,74	106,80	109,59
2	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%				83,37	84,05	84,96	84,24	84,92	83,37	83,47	83,79	84,24	86,09	100,00	99,31	98,62	100,00	101,38
3	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%				94,89	95,04	95,70	95,72	96,19	94,95	94,99	94,52	96,05	95,71	100,06	99,95	98,77	100,34	99,50
4	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%				84,74	85,67	86,90	86,07	86,99	84,74	84,98	85,45	86,07	88,44	100,00	99,19	98,33	100,00	101,67
5	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%				90,70	90,79	91,18	91,15	91,43	90,71	90,73	95,90	89,23	98,29	100,01	99,93	105,18	97,89	107,50
6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%				80,86	81,55	82,46	81,74	82,43	80,86	80,98	81,29	81,74	86,09	100,00	99,30	98,58	100,00	104,44
7	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%				96,33	96,46	97,05	97,29	97,71	96,38	96,42	94,63	98,69	96,06	100,05	99,96	97,51	101,44	98,31
8	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ	%				82,78	83,45	84,34	84,13	84,80	82,78	83,00	83,68	84,13	85,46	100,00	99,46	99,22	100,00	100,78

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wilayah Semarang																			
9	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%				90,65	90,80	91,46	91,65	92,12	90,79	90,83	95,53	93,01	95,49	100,15	100,03	104,45	101,48	103,66
10	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%				90,74	91,45	92,41	91,89	92,61	90,74	90,91	91,42	91,89	93,60	100,00	99,41	98,93	100,00	101,07
11	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%				96,12	96,27	96,93	96,96	97,43	96,14	96,18	91,52	83,33	91,92	100,02	99,91	94,42	85,94	94,34
12	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%				91,73	92,51	93,55	92,92	93,70	91,73	91,92	92,40	92,92	94,85	100,00	99,36	98,77	100,00	101,23
13	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%				86,45	86,61	87,32	87,44	87,94	86,55	86,58	89,86	97,69	91,89	100,12	99,97	102,91	111,72	104,49
14	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%				90,13	91,04	92,25	91,49	92,40	90,13	90,29	90,88	91,49	93,77	100,00	99,18	98,51	100,00	101,48
15	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%				81,71	81,94	82,96	83,49	84,21	81,82	81,88	77,68	84,87	80,61	100,13	99,93	93,64	101,65	95,72
16	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%				86,34	87,54	89,14	88,82	90,02	86,34	86,65	88,03	88,82	91,13	100,00	98,98	98,75	100,00	101,23
17	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%				91,75	92,01	93,13	93,35	94,15	91,78	91,86	92,24	96,50	93,92	100,03	99,84	99,04	103,37	99,76
18	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%				89,91	91,45	93,49	92,66	94,19	89,91	90,38	91,63	92,66	94,73	100,00	98,83	98,01	100,00	100,57
A 2	Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi																			
1	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Persentase jumlah pelayanan air minum dan sanitasi serta bangunan gedung milik daerah menuju baik	%				0,00	0,00	0,00	51,07	52,36	0,00	0,00	0,00	51,59	52,39	0,00	0,00	0,00	101,02	100,06

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B 2.1	Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat																			
1	Persentase akses aman air aman perkotaan	%				86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	86,82	88,23	90,32	0,00	0,00	100,78	100,09	100,19	0,00	0,00
2	Persentase akses aman air aman perdesaan	%				76,30	78,05	79,80	81,55	83,30	76,71	81,98	83,42	0,00	0,00	100,54	105,04	104,54	0,00	0,00
3	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%				83,50	85,50	87,50	92,80	93,90	89,57	90,72	88,67	0,00	0,00	107,27	106,11	101,34	0,00	0,00
4	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%				0,00	0,00	0,00	88,83	90,45	0,00	0,00	0,00	88,97	90,45	0,00	0,00	0,00	100,16	100,00
C. 2.1.1	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi																			
1	Persentase akses air minum perkotaan	%				86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	86,82	88,23	90,32	92,45	94,15	100,78	100,09	100,19	100,33	100,00
2	Persentase akses air minum perdesaan	%				83,50	85,50	87,50	81,55	83,30	76,71	81,98	83,42	84,08	83,30	91,87	95,88	95,34	103,10	100,00
C. 2.1.1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum																			
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%			100,00	0,00	0,00	0,00	89,39	100,00	0,00	0,00	0,00	89,39	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
C 2.1.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																			
1	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%				83,50	85,50	87,50	92,80	93,90	89,57	90,72	88,67	90,38	91,50	107,27	106,11	101,34	97,39	97,44
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%			93,90															

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B 2.2	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi																			
1	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%				11,17	12,18	13,20	13,30	14,27	11,17	11,37	12,42	14,21	15,23	100,00	93,35	94,09	106,84	106,73
C 2.2.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi																			
1	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%				11,17	12,18	13,20	13,30	14,27	11,17	11,37	12,42	0,00	0,00	100,00	93,35	94,09	0,00	0,00
2	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%				9,71	11,86	14,13	16,54	19,09	9,71	11,86	14,13	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
C 2.2.1	Program Penataan Bangunan Gedung																			
1	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%				11,17	12,18	13,20	13,30	14,27	11,17	11,37	12,42	14,21	15,23	100,00	93,35	94,09	106,84	106,73
C 2.2.2	Program Penataan Bangunan Lingkungannya																			
1	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%				0,00	0,00	0,00	13,30	14,27	0,00	0,00	0,00	14,21	15,23	0,00	0,00	0,00	106,84	106,73
C 2.2.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi																			
1	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%				9,71	11,86	14,13	16,54	19,09	9,71	11,86	14,13	16,54	19,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%		100,00																

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2019-2022

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 di atas dapat diketahui bahwa persentase pelayanan yang dilakukan oleh dinas tidak mengalami perbedaan gap yang terlalu signifikan, hanya beberapa indikator kinerja ada **Program Penyelenggaraan Jalan** yaitu pada indikator kinerja **Persentase Database Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Yang Termutakhirkan** tahun 2020 di mana capaian mengalami penurunan hingga 66,67% dari tahun 2019 mencapai 100% dan pada tahun 2020 turun menjadi 33,33% dan pada indikator kinerja **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebinamargaan** pada tahun 2020 mencapai 98,34% mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 59,86% yang terjadi sebagai imbas dari adanya pandemi, kemudian pada tahun setelahnya mengalami peningkatan kembali sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Hampir seluruh indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dinas berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)					APBD pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendapatan	7.500.000	5.500.000	6.000.000	6.538.650	9.325.000	5.000.000	3.864.832	6.000.000	6.600.385	9.325.000	5.650.044	5.927.519	7.377.003	8.309.214	9.325.000
2	Belanja	906.442.224	1.073.124.250	1.236.381.914	1.378.537.146	1.079.962.125	869.138.366	380.899.052	735.394.981	791.634.584	777.117.959	832.880.581	371.340.182	713.738.265	734.576.374	777.117.959
3	Pembiayaan															

No.	Uraian	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	113,00	153,37	122,95	125,89	100,00	865.000,00	1.092.033,60
2	Belanja	95,83	97,49	97,06	92,79	100,00	-18.404.081,40	79.243.781,40
3	Pembiayaan							

Dalam tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di atas, dapat diketahui bahwa rasio realisasi dan anggaran pendapatan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung ke arah positif untuk pertumbuhannya, dengan realisasi pendapatan terendah di tahun 2019 di angka 113% dan realisasi tertinggi pada tahun 2020 di angka 153%. Sedangkan untuk rasio realisasi dan anggaran belanja dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rasio terendah pada tahun 2022 di angka 92,79%. Factor pandemic pada tahun 2020 dan 2021 mempengaruhi alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada lingkup pendanaan sehingga berpengaruh pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, karena berkaitan dengan operasional pelayanan peralatan dan sumber daya manusia serta progress pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas selama tahun-tahun terdampak.

Dalam Rencana Strategis ini diproyeksikan untuk alokasi pendanaan dalam perencanaan penganggaran selama periode tahun 2024 sampai dengan 2026 untuk dapat menyesuaikan dengan program, kegiatan maupu sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang disepakati dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 ini.

2.3.4. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar lingkup Provinsi, yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota.

Dengan mutu Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Mutu pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota;
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Tabel 2.3 Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2020 (%)	REALISASI 2021 (%)	REALISASI 2022 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas kabupaten/ kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh curah lintas Kabupaten/ Kota	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 %	100 %	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Persentase jumlah masyarakat/ rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)

2.3.5. Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dinas PU BMCK menyelenggarakan urusan pekerjaan umum.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan		IKK Output	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional	
1.	Pekerjaan Umum	10		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	1.073	100,00%	PU BMCK	<ul style="list-style-type: none"> Air minum curah adalah air minum hasil olahan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten/kota. Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD. Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Provinsi tersebut. Daerah yang tidak memiliki SPAM lintas Kab/Kota untuk melayani penyaluran Air Minum harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya, dengan pengisian pada SI LPPD 0/1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 	
						Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	1.073				
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota			Ada/Tidak		3	3	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi			Ada/Tidak		tidak ada	tidak ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM			BUMD/UPTD		1	1	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk penyelenggaraan SPAM			Izin		2	2	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Jumlah kerja sama			Kerja sama		6	6	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		

No	Urusan		IKK Output	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
			penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.							
		11		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik/Regional	0	0,00%	PU BMCK	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Daerah yang tidak memiliki SPAL Domestik Reagional untuk melayani Pengolahan Air Limbah Domestik harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya dengan pengisian pada SI LPPD 0/1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
			1	Jumlah SPALD Regional	Unit		0	0	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			2	Total kapasitas SPALD Regional	Unit		0	0	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			3	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Unit		0	0	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Unit		1754	1754	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			5	Jumlah BUMD/UPTD/ Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Ada/ Tidak Apabila ada, disebutkan jumlahnya BUMD/ UPTD		0	0	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
				Rasio kemandapan jalan	%	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	2.224,159	92,49%	PU BMCK	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengukur perhitungan tingkat kemandapan jalan meliputi panjang jalan dan jembatan. Kemandapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
						Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi	2.404,741			

No	Urusan		IKK Output	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional	
12		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		KM		2404,741	2404,741	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		3	Panjang jalan yang dibangun		KM		3,66	3,66	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		4	Panjang jembatan yg dibangun		M		0	0	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		KM		42,254	42,254	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		6	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan		M		50,6	50,6	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM		29,53	29,53	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		8	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M		222,6	222,6	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		9	Panjang jalan yang dipelihara		KM		2.332,958	2.332,958	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		10	Panjang jembatan yang dipelihara		M		24.066,97	24.066,97	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
13				13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	7.016	100,00%	PU BMCK	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sertifikat pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
					Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi		7.016				
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		Orang		200	200	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		Orang		28.653	28.653	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang		Orang		7.016	7.016	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

No	Urusan		IKK Output	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
			tersertifikasi ahli di wilayah provinsi							
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		8	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		9	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan latihan Kerja (LPKK)		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		10	Tersedianya data dan informasi		Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
				tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli								
			11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi			Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			Ada/ Tidak		tidak	tidak	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			Ada/ Tidak		ada	ada	PU BMCK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.3.6. Inovasi dan Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dalam lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk meraih prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum kepada masyarakat. Di bawah ini terdapat beberapa prestasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya antara lain:

- a. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2007;
- b. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2008;
- c. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2009;
- d. Penghargaan Khusus Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga Tahun 2010;
- e. Terbaik I Kategori Provinsi, Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014.
- f. Penghargaan Kategori Menuju Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
- g. Top 20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – Inovasi Jalan Cantik.
- h. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.



Gambar 2.9 Penghargaan DPU BMCK Jateng pada Kategori Informatif 2020

- i. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.



Gambar 2.10 Penghargaan DPU BMCK Jateng pada Kategori Informatif 2021

- j. Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – Inovasi Jalan Cantik dan SILAKON BANGJALI.



Gambar 2.11 DPU BMCK Jateng Menerima Penghargaan Top 10 KIPP

- k. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.



Gambar 2.12 Penghargaan DPU BMCK pada Kategori Informatif 2022

1. Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022, Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik.



Gambar 2.13 DPU BMCK Jateng Menerima Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022

- m. Juara 1 Ktegori Pemerintah Provinsi “Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinaamargaan untuk Penyelenggaraan Jalan Dalam Rangka Hari Jalan Tahun 2022” dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Gambar 2.14 DPU BMCK Jateng Juara I dalam Penilaian Kinerja

Selain prestasi yang diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, juga membuat inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan urusan pekerjaan umum, antara lain:

a. KLIK BINMARCIPKA

Klik Binmarcipka adalah aplikasi aduan masyarakat terkait pembangunan kebinamargaan dan keciptakaryaannya. Aplikasi ini mengintegrasikan semua isu kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Klik Binmarcipka merupakan layanan satu pintu yang menghubungkan pada 13 layanan publik, seperti *lan Cantik*, *WebGIS Jalan*, *Simanis Cika* (Sistem Informasi Air Minum Dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah), *Mas Petruk* (Informasi Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi), *Silakon Bangjali* (Sistem Layanan Laboratorium Konstruksi Bangunan Gedung, Jalan dan Lingkungan), dan *Sibangun Keren* (Sistem Informasi Bangunan Gedung). Aplikasi ini dapat diunduh melalui *Play Store* serta dapat ditemui pada *website* milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



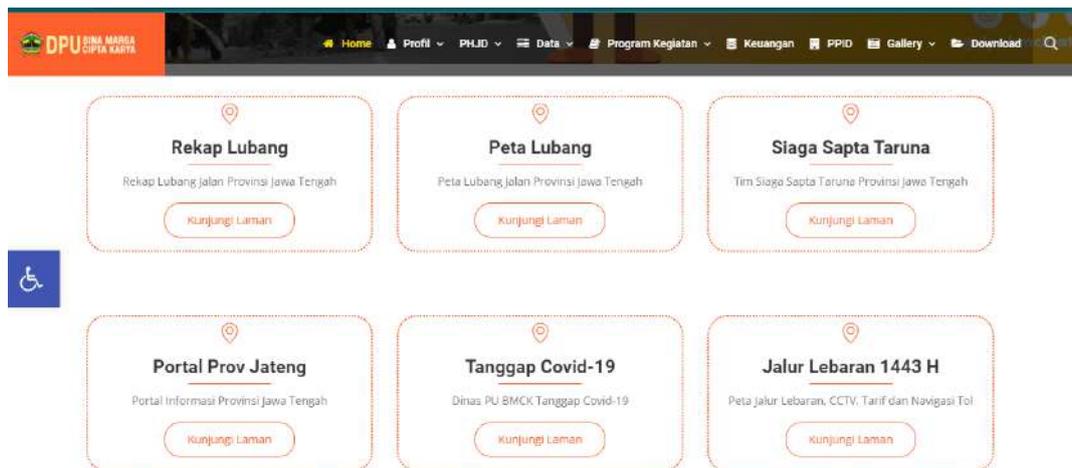
Gambar 2.15 Launching Klik Binmarcipka

Sumber: <https://jatengprov.go.id/publik/klik-binmarcipka-isu-jalan-gedung-jembatan-hingga-air-minum-dalam-satu-genggaman/>

b. DASHBOARD SATU DATA PENYELENGGARAAN JALAN

Dashboard satu data penyelenggaraan jalan dapat dijumpai pada *website* <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>. Pada

laman ini, masyarakat dapat mengetahui data kondisi jalan sejak tahun 2017 sampai saat ini. *Dashboard* penyelenggaraan jalan juga menyajikan rekap data jalan yang berlubang dan presentase jalan dengan kondisi baik.



Gambar 2.16 Interface Dashboard Satu Data Penyelenggaraan Jalan

Sumber: <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

c. JALAN CANTIK

Jalan cantik adalah aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah provinsi jawa tengah. Aplikasi Jalan Cantik di bangun oleh DPU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat jawa tengah melalui aplikasi tersebut. Anda bisa melaporkan situasi kerusakan jalan atau jembatan yang anda lihat melalui aplikasi yang tersedia di *play store*. Laporan masyarakat dapat terpantau secara langsung melalui aplikasi dari proses pengerjaan sampai selesai.



Gambar 2.17 Interface Jalan Cantik

Sumber: <https://jalancantik.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/download-apps>

d. SIMANIS CIKA

Simanis Cika merupakan sistem informasi terkait air minum dan sanitasi publik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya. Simanis Cika memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi air minum, air limbah domestik, persampahan, daerah rawan air dan air baku, serta SPAM JP. Simanis Cika dapat dikunjungi oleh masyarakat melalui *website* <http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.



Gambar 2.18 Interface Simanis Cika

Sumber: <http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.

e. SIBANGUN KEREN

Sibangun Keren adalah sistem informasi bangunan gedung yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya pada tahun 2022. Sibangun Keren memberikan informasi kepada masyarakat terkait bangunan bersejarah, kinerja bangunan, data gedung di Jawa Tengah. Selain memberikan informasi, Sibangun Keren juga memberikan bantuan teknis kepada masyarakat pada penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN) dari tahap perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.



Gambar 2.19 Interface Sibangun Keren

f. MAS PETRUK

Mas Petruk merupakan sistem informasi mengenai pasar konstruksi. Sistem ini memuat berita jasa konstruksi, harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan konstruksi, standar harga satuan tertinggi, serta badan usaha di bidang konstruksi.

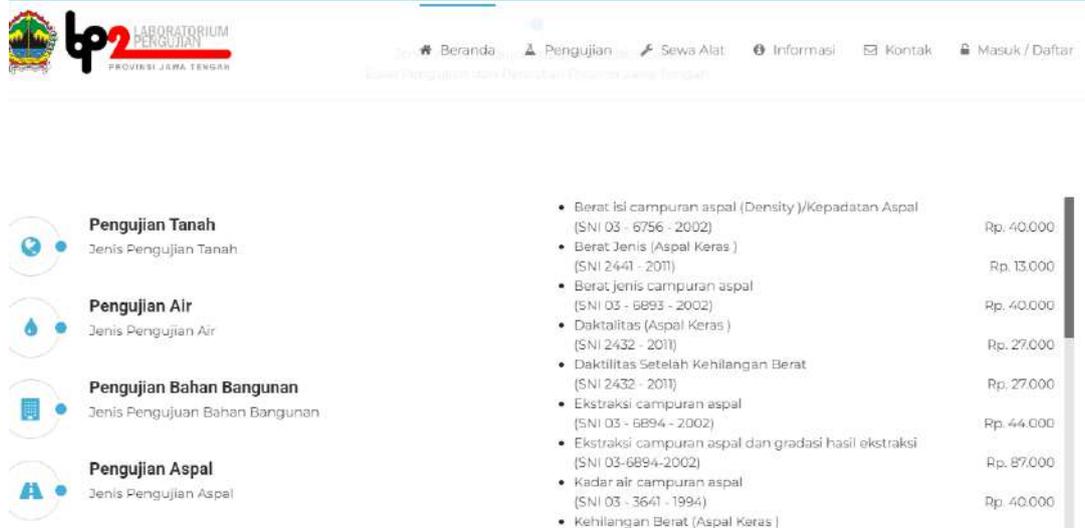


Gambar 2.20 Interface Mas Petruk

Sumber:<http://maspetruk.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

g. SILAKON BANGJALI

Silakon Bangjali merupakan Sistem Layanan Laboratorium Konstruksi Bangunan Gedung, Jalan dan Lingkungan. Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pengujian konstruksi bangunan, gedung, jalan dan lingkungan di Jawa Tengah. Melalui aplikasi ini, layanan diberikan secara akuntabel sehingga mencegah praktik korupsi. Layanan ini, bisa diakses baik melalui peramban di komputer maupun telepon genggam, pada <https://silakon.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.



Gambar 2.21 Interface Silakon Bangjali

Sumber: <https://silakon.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.

h. WA ALBAR

Wa Albar merupakan *platform* penyewaan alat berat seperti *ColdMilling, Excavator, Bulldozer, Grader, Loader, Truck, Vibro, Crane, Shef Leoder, Finisher, Tire Roller, Dump Truck, Truck trailer* dan lain sebagainya. Alat berat ini langsung disewakan oleh Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Provinsi Jawa Tengah. Di dalam aplikasi ini tertera daftar harga penyewaan alat berat dengan berbagai tipe sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk memilih alat berat sesuai kebutuhan. Layanan ini dapat ditemukan masyarakat pada *website* <https://albar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.

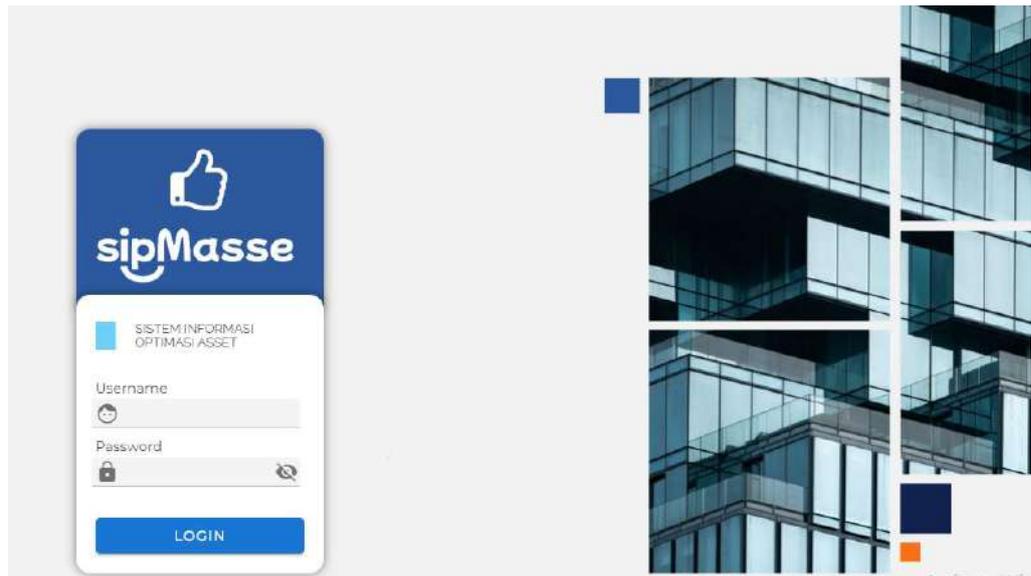


Gambar 2.22 Interface Wa Albar

Sumber: <https://albar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

i. SIP MASSE

SipMasse adalah sistem informasi terkait optimasi asset. Masyarakat dapat menjangkau SipMasse pada *website* <https://sipmasse.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.



Gambar 2.23 Interface Sip Masse

Sumber: <https://sipmasse.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

j. GERAAM

Geraam merupakan layanan pengaduan masyarakat terkait jalan rusak atau tergenang. Aplikasi ini dapat diunduh melalui *playstore*. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui titik lokasi pengaduan terkait jalan rusak dan tergenang.



Gambar 2.24 Interface GERAAM

Sumber: <https://geraam.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

k. CINTA LAPANGAN

Cinta Lapangan adalah sistem informasi yang bertujuan sebagai alat presensi pekerja lapangan. Platform ini membantu meningkatkan efisiensi kinerja pekerja lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Platform Cinta Lapangan dapat dijumpai pada website <http://cintalapangan.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.

DATA PRESENSI 7 HARI TERAKHIR									
Nama Pengguna	Titik Koordinat Datang	Tanggal Datang	Jam Datang	Foto Datang	Titik Koordinat Pulang	Tanggal Pulang	Jam Pulang	Foto Pulang	Waktu Bekerja
Riky Purnomo	Kantor BPI Wilayah Magelang 2	2023-03-06	11:53:08						
Agus Syarif Hilmi	Kantor BPI Semarang	2023-03-06	11:15:51						
Warsiyo	Kantor BPI Semarang	2023-03-06	10:52:41						
Alhan Riko Arianto	Kantor BPI Semarang	2023-03-06	10:49:02						

Gambar 2.25 Interface Cinta Lapangan

Sumber: <http://cintalapangan.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>.

1. RAMPUNG BAYAR

Rampung Bayar merupakan sistem informasi keuangan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem informasi ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana *progress* dari paket pekerjaan yang sedang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Sistem informasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan membangun kepercayaan publik.

No	Paket Pekerjaan	Kontrak/Penyedia	Progress
1	PAKET: PENGADAAN ASPAL EMULSI CRS-1 JALAN BPJ WILAYAH PATI 1	0272/171 CV. UTAMA KARYA	0 %
2	PAKET: PENGADAAN BAHAN/MATERIAL JALAN BPJ WILAYAH PATI 2.	0272/133 MANDIRI ABADI CV	NaN %
3	PAKET: PENGADAAN BAHAN/MATERIAL JALAN UNTUK PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BPJ WILAYAH PATI 1.	0272/131 SUMBER MAKMUR CV	0 %
4	PAKET PENGADAAN ASPAL EMULSI CRS-1 JALAN WILAYAH SURAKARTA 2.	0272/023 DAYA UTAMA CV	NaN %
5	PAKET PENGADAAN ASPAL PEN 60/70 JALAN BPJ WILAYAH SURAKARTA 2.	60/70 PURNAMA ABADI CV	NaN %
6	PAKET PENGADAAN BAHAN / MATERIAL JALAN BPJ WILAYAH SURAKARTA 2.	0272/009 ARISTA KONSTRUKSI CV	NaN %
7	PAKET PENGADAAN BAHAN/MATERIAL JALAN WILAYAH MAGELANG 2	0272/66 GUNA MULYA TAMA CV	0 %
8	PAKET PENGADAAN CAMPURAN ASPAL PANAS (CAP) JALAN BPJ WILAYAH SURAKARTA 1.	0272/067 RESTU PUTRA CV	NaN %
9	PAKET PENGADAAN CAMPURAN ASPAL PANAS (CAP) JALAN BPJ WILAYAH SURAKARTA 2.	0272/059 SELFIDDAR SEJAHTERA CV	0 %
10	PAKET DEHARI ITASI IAI AN KI AMRI / RTS KAR KIDUC - BUDWADADI	620/403	NaN %

Gambar 2.26 Interface Rampung Bayar

Sumber: <https://rampungbayar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisis SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas;
2. Adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;
3. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
4. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
5. Pengembangan inovasi teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan dilapangan berupa aplikasi Jalan Cantik, Geraam, Silakon Banjali, Simanis Cika, Rampung Bayar, Cinta Lapangan, Dashboard Satu Data Penyelenggaraan Jalan (2021), Sibangun Keren, Walabar, Mas Petruk, Sipmasse;
6. Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
7. Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
8. Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
9. Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
10. Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
11. Adanya penyebaran informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Banyaknya pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai keperuntukannya;
3. Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;
4. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor;
5. Masih terdapat ruas Jalan Provinsi yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
6. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan;
7. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang

layak di perkotaan maupun perdesaan;

8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
9. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
10. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.
11. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
12. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
13. Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
14. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.

2. Analisis Faktor Exsternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya PerdaNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
2. Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur, PHJD, Inpres;
3. Adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui program padat karya di bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;
4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling*, *rigid pavement* dan beton *pre-cast*;
6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih;
7. Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota;
8. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan

pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;

9. Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
10. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
11. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
12. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
13. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

b. Ancaman

1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);
2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
4. Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
5. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;
6. Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
7. Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
8. Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah;
9. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
10. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;
11. Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
2. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/ pemeliharaan, dan peningkatan/ pembangunan/ penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;
3. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung PerdaNomor 8 Tahun 2016 tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
4. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
5. Mengatasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen - segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
6. Mengoptimalkan penanganan ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar kolektor dengan memanfaatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
7. Mengatasi pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan menerapkan peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
8. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling*, *rigid pavement* dan beton *pre-cast*;
9. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan dan *over* dimensi (lebih dari MST 8 Ton);

10. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
11. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
12. Mengoptimalkan adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah provinsi;
13. Menanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar jalankolektor yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil dan menghindari penggunaan galian Golongan C sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
14. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;
15. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
16. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
17. Mengatasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
18. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
19. Mengoptimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian mutu bahan dalam kegiatan konstruksi;
20. Mengoptimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Infrastruktur jalan merupakan prasarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan infrastruktur jalan yang baik mampu mendukung konektivitas antar daerah sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan perkonomian masyarakat dari kota sampai desa.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan Lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan, masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

1. Jalan nasional meliputi:
 - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - antarpusat kegiatan nasional;
 - antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
 - pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang

menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer

- c. Jalan strategis nasional; dan
 - d. Jalan Tol.
2. Jalan Provinsi meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
 - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
3. Jalan Kabupaten meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
 - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: (ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; ibu kota kabupaten dengan pusat desa; antaribu kota kecamatan; ibu kota kecamatan dengan pusat desa; ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; antarpusat kegiatan lokal; antardesa; dan poros desa).
 - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. Jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota sebagaimana meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
 - b. pusat pelayanan dengan persil;
 - c. antarpersil;
 - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
 - e. Jalan poros desa dalam wilayah kota

Sistem jaringan jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan status jalan adalah :

- a. Jaringan Jalan Nasional = 1.518,09 Km (Keputusan Kementrian Perkerjaan Umum NO : 480/KPTS/M/2022)
- b. Jaringan Jalan Provinsi = 2.440,12 Km (Keputusan Gubernur Jawa Tengah NO : 622 / 11 / Tahun 2022)
- c. Jaringan Jalan Kabupaten/Kota = 27.314,31Km.



Gambar 3.1 Peta Ruas Jalan Menurut Kewenangan di Provinsi Jawa Tengah

Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Selain kebinamargaan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan keciptakaryaannya antara lain terkait akses air minum dan pengolahan air limbah serta bangunan gedung. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman merupakan salah satu permasalahan dalam memenuhi pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah di lingkup provinsi Jawa Tengah. Selain air minum dan air limbah, permasalahan konstruksi juga masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yaitu belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah memastikan kondisi Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah sesuai standart bangunan. Namun masih adanya bangunan-bangunan Gedung yang belum standar yang bisa merugikan masyarakat maupun pegawai lingkup pemerintahan.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan masing-masing bidang urusan kebinamargaan dan keciptakaryaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Bidang Kebinamargaan)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kinerja Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah belum terpenuhi	Panjang jalan provinsi yang belum sesuai standar jalan kolektor	Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m
			Masih ada ruas jalan yang kualitas strukturnya belum sesuai standar kolektor (MST 8 Ton)
			faktor geografis yang menyebabkan adanya ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.
			Belum cukupnya ketersediaan lahan yang diperlukan
		Kondisi permukaan jalan belum mantap	Kendaraan yang melintasi jalan melebihi standar Muatan Sumbu Terberat/ ODOL (Over Dimension Over Load)
			Intensitas hujan yang cukup tinggi
			Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bahu jalan, dan dinding penahan tanah)
			Sudah terlampauinya umur rencana jalan
			Masih kurangnya peralatan pendukung pemeliharaan rutin
		Kerusakan Jembatan setiap tahun	Kendaraan yang melintasi jembatan melebihi standar Muatan Sumbu Terberat/ ODOL (Over Dimension Over Load)
			Terdapat jembatan yang berada di daerah alur sungai dengan debit besar, berarus deras
			Sudah terlampauinya umur rencana jembatan
			Terdapat jembatan yang belum sesuai standar dengan lebar kurang dari 7 m

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Bidang Keciptakarya)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional belum sesuai target	Keterbatasan JDU yang belum sampai ke rencana daerah layanan
			Kebocoran pada pipa JDU dan pipa PDAM Offtaker
			Rendahnya minat masyarakat untuk memasang SR (Sambungan Rumah) yang menyebabkan <i>idle capacity</i>
			Keterbatasan Kabupaten / Kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/ inisiasi SPAM Regional Jawa Tengah
		Persentase capaian Akses Jaringan Perpipaan masih rendah	Pembinaan teknis kepada KP/BP SPAM belum menyeluruh, karena keterbatasan jumlah peserta Bintek untuk tiap Kabupaten/Kota.
			Pembinaan teknis kepada PDAM Kabupaten/Kota masih belum optimal karena output yang diharapkan belum maksimal
2	Kurang optimalnya akses air limbah domestik	Kurangnya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik regional	Belum adanya penyediaan prasarana sarana air limbah domestik regional
			Kurangnya pembinaan teknis dan pemberdayaan/pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah
			Kurangnya pengembangan dan penyediaan prasarana sarana air limbah domestik
3	Masih terdapat penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang belum sesuai standar	Kurang optimalnya hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Kurangnya koordinasi teknis dengan SKPD Teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah
			Kurangnya pemahaman terkait aturan bangunan gedung dan jasa konstruksi sesuai standar
			Kurangnya jumlah penyelenggara bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang mendapat pembinaan
			Kurangnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat
		Harga satuan pekerjaan konstruksi yang berbeda-beda tiap wilayah	Harga satuan dasar yang dinamis mengikuti perkembangan pasar

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD Tahun 2018- 2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD paska pilkada serentak di tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi RPJPD Tahun 2005-2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera merupakan keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya, dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD.

Berdasarkan dokumen RPD, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, mempunyai keterkaitan dengan 3 sasaran dari 4 sasaran di dalam dokumen RPD Provinsi Jawa Tengah yang terlihat pada gambar berikut ini.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 yang Terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN RPD 2024-2026				
"JAWA TENGAH YANG SEMAKIN SEJAHTERA DAN LESTARI"				
NO.	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
1.	MENINGKATNYA PEREKONOMIAN TANGGUH YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN.	MENINGKATKAN KUALITAS JALAN PROVINSI.	PERSENTASE JALAN PROVINSI SESUAI STANDAR JALAN KOLEKTOR DAN KONDISI PERMUKAAN MANTAP	1. MENINGKATNYA PANJANG JALAN PROVINSI DENGAN KUALITAS STRUKTUR DAN KAPASITAS SESUAI STANDAR JALAN KOLEKTOR.
		MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN (PE)	INDEKS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN	2. TERJAGANYA KONDISI PERMUKAAN JALAN MANTAP.
				MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN.
				MENINGKATNYA AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN.
2.	MENINGKATNYA KETAHANAN SDA DAN LH	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN (LH)	INDEKS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN	MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN.
3.	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN (IRB)	INDEKS PELAYANAN KECIPTAKARYAAN	MENINGKATNYA KUALITAS HASIL PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG MILIK DAERAH.

3.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu, sangatlah perlu memerhatikan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat disahkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah:

Tabel 3.4 Indikator Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
2	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
3	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
4	Persentase kondisi mantap jalan Provinsi	68	75

3.2.3 Implikasi RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 terhadap Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Tujuan dari kegiatan penyusunan revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 adalah untuk menyempurnakan dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2023, disesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan pembangunan yang baru di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, RTRW ini juga berfungsi sebagai penunjang penyusunan kembali konsep dan strategi rencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkembang sesuai dengan dinamika aktivitas pembangunan dan ketatanegaraan.

Di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 memuat arahan program yang dituangkan dalam perencanaan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Usulan program utama di dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya memuat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang provinsi, serta mencakup perwujudan kawasan-kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang provinsi serta kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang

meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis provinsi dan kawasan lain di luar kawasan strategis provinsi yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam waktu 5 tahunan.

Arahan pemanfaatan ini mencakup program-program utama untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang hendak dituju sampai akhir tahun perencanaan. Berikut merupakan indikasi program utama perwujudan sistem jaringan yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.5 Indikasi Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		Waktu Pelaksanaan	
				Utama	Pendukung	2020-2024	2004-2009
PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI							
A.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan						
1.	Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Jalan lingkaran Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang – Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan Pati;					√	
	Ruas Baru lingkaran metropolitan Kedungsepur					√	√
	Ruas Baru metropolitan Subosukawonosraten;						√
	Ruas Baru metropolitan Bregasmalang						√
2.	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Pejagan – Ketanggungan, Ketanggungan – Prupuk, Tegal – Slawi – Prupuk – Ajibarang – Purwokerto, Purwokerto – Sokaraja, Sokaraja – Purbalingga, Randu Dongkal – Bobotsari, Purbalingga – Bobotsari, Purbalingga – Klampok, Mandiraja – Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara – Wanayasa, Magelang – Salatiga, Boyolali – Klaten, Surakarta – Sukoharjo, Sukoharjo – Wonogiri, Wonogiri – Biting, Prembun – Selokromo, Jati – Purwodadi, Purwodadi – Godong, Surakarta – Purwodadi - Pati, Kudus – Jepara, Boyolali – Blabak, Bumiayu – Randudongkal – Kebonagung – Bawang – Sukorejo – Cangkiran – Ungaran, Weleri – Parakan, Bawang – Dieng, Slawi – Randudongkal, Randudongkal – Moga					√	√
	Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto - Banyumas – Wonosobo – Secang					√	
	Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang					√	
	Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, Patimuan – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu – Perbatasan Jawa Timur, Klaten – Cawas – Jentir, Sukoharjo – Watukelir,				√	√	

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		Waktu Pelaksanaan	
				Utama	Pendukung	2020-2024	2004-2009
	Wonogiri – Pacitan serta Wonogiri – Namengan (Perbatasan Yogyakarta)						
	Bawang – Dieng					√	√
	Kebumen – Karangsembung – Banjarnegara					√	√
3.	Pengembangan Jalan Tol		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur					√	√
	Pengembangan jalan tol sepanjang Solo – Sragen – Perbatasan Jawa Timur					√	
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Solo					√	
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Bawen					√	
	Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta					√	√
	Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan – Cilacap					√	√
	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kab/Kota Terkait Prasarana Limbah Drainase		
A.	Pengembangan prasarana limbah dan drainase						
	pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun					√	
	pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh ibukota kabupaten/kota					√	
	pengembangan sumur resapan di tiap bangunan					√	

Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

3.2.4 Implikasi KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.2 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.



Gambar 3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 tujuan TPB/SDGs. Satu tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 9 “Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi “.

Di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disebutkan bahwa RPJMD Provinsi Jawa Tengah

dilaksanakan hingga tahun 2023. Oleh sebab itu, proyeksi TPB Provinsi Jawa Tengah juga dilaksanakan hingga akhir tahun RPJMD yaitu 2023 untuk masing-masing indikator. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan baseline data capaian TPB tahun 2017-2019 yang kemudian dilakukan perhitungan tren pertumbuhannya dengan menggunakan laju perubahan BAU (business as usual) atau laju pertumbuhan umum. Berdasarkan proyeksi tersebut, maka dapat diperkirakan capaian untuk masing-masing indikator pada tahun 2023 dan kemudian dibandingkan dengan target Perpres 59/2017. Hasilnya menunjukkan indikator yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah belum sepenuhnya tercapai di tahun 2019 dan dengan program yang telah dilaksanakan sebelumnya akan tetap mencapai target Perpres. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan analisis capaian TPB untuk masing-masing indikator di tahun 2023 terhadap target Perpres 59/2017.

Tabel 3.6 Analisis Proyeksi Capaian TPB Tahun 2023 terhadap Target Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 untuk OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No. Indikator	Indikator	Capaian			Target 2030	Proyeksi		Status	
		2017	2018	2019		Rate BAU	2023	TPB 2019	TPB 2023
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	72,8	73,03	90,86	100	9,03	100	Belum tercapai	Sudah tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	80	65,01	75,68	100	-2,16	67,04	Belum tercapai	Belum tercapai
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	72,8	78,16	93,82	100	10,51	100	Belum tercapai	Sudah tercapai
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	-	-	43,45	100	-	-	Belum tercapai	Belum tercapai
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	80	65,01	80,29	100	7,64	100	Belum tercapai	Sudah tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	35	35	35	Naik	-	Naik	Sudah tercapai	Sudah tercapai
9.1.1 (a)	Kondisi Jalan Mantap Nasional	88,92	89,6	91,5	Naik	1,28	Naik	Sudah tercapai	Sudah tercapai
9.1.1 (b)	Panjang Pembangunan Jalan Tol	-	301,21	359,8	Naik	57,59	Naik	Sudah tercapai	Sudah tercapai

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Berdasarkan distribusi indikator tanpa upaya tambahan setiap tujuan dan pilar maka secara umum pilar hukum dan tata kelola memiliki kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan pilar lainnya. Berikut adalah distribusi indikator-indikator capaian TPB Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah yang akan tercapai sampai dengan tahun 2023 berdasarkan skenario tanpa upaya tambahan.

Tabel 3.7 Skenario Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan

No. Indikator	Indikator	Baseline			Target 2030	Proyeksi	
		2017	2018	2019		Rekomendasi Target	Status TPB
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	72,8	73,03	90,86	100	100	Sudah tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	16,62	3,21	9,02	Naik	32,26	Sudah tercapai

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

3.2.5 Penentuan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

Perangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi teknis pelayanan minimal jalan kolektor pada jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kelengkapan bangunan pelengkap jalan;
3. Optimalisasi umur rencana jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Stabilitas jalan dan tanah di ruas jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Inventarisasi pengamanan, dan pemeliharaan asset perangkat daerah;
6. Penggunaan produk dalam negeri dalam konstruksi jalan;

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

7. Aksesibilitas pelayanan air bersih;
8. Aksesibilitas pelayanan air limbah domestic;
9. Kualitas dan kompetensi SDM jasa konstruksi;
10. Standarisasi teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

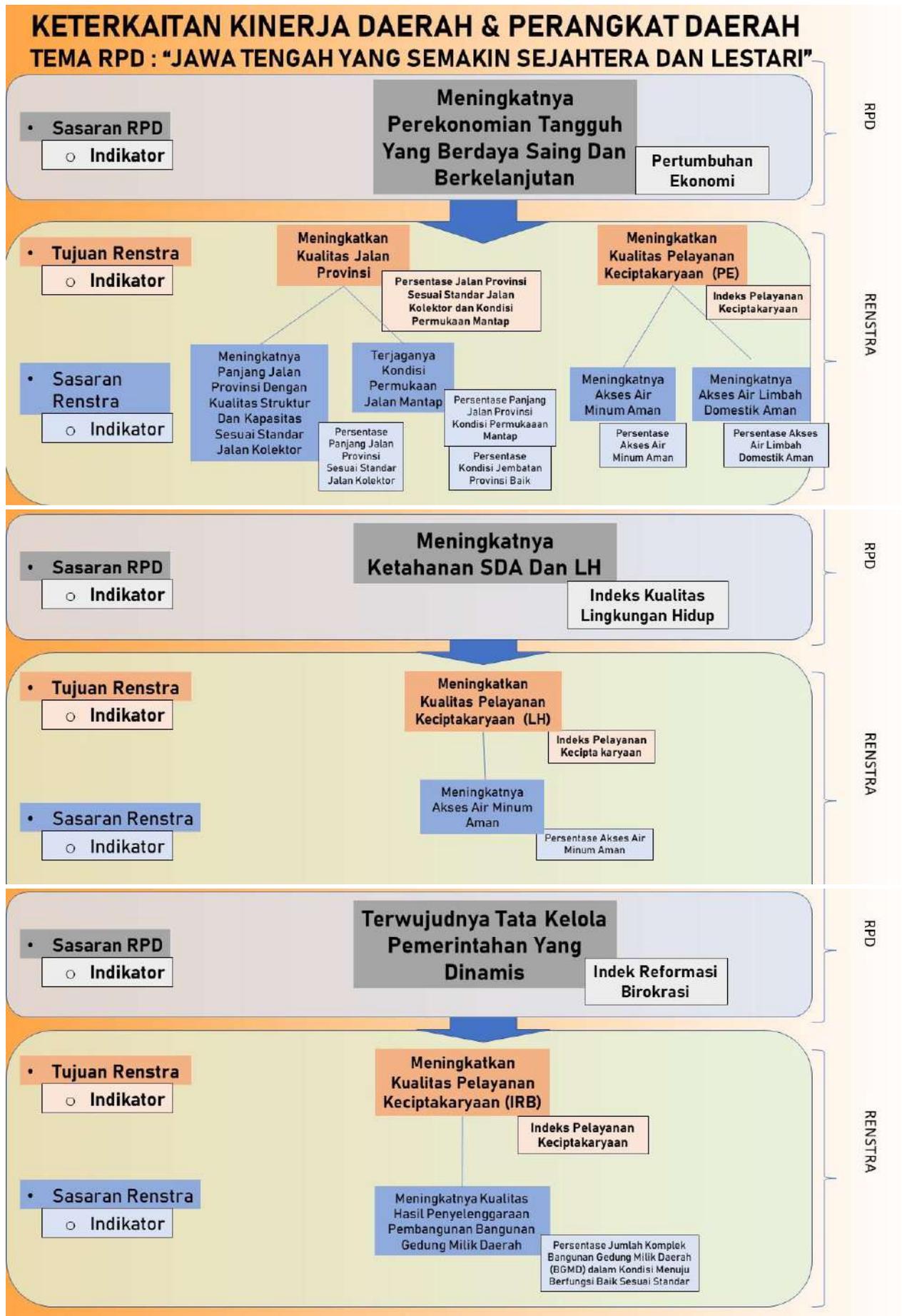
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Seiring dengan berkembangnya pembangunan daerah yang semakin pesat, penyediaan kapasitas pelayanan di bidang infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaannya ini sudah seharusnya diikuti dengan pengimplementasian kualitas dan kapasitas infrastruktur dan SDM yang terkini dan terdepan. Sebagai bentuk komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pengelolaan layanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam terselenggaranya pelayanan di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya. Hal ini sejalan dengan semua kompleksitas isu terkini yang diperbaharui dengan data *real-time* yang lengkap, cepat tersampaikan pada masyarakat luas, dan memiliki informasi yang jelas atau sah. Dalam hal ini, peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting sesuai dengan amanat dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pelaksanaan peran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, diimplementasikan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana tidak adanya visi dan misi Kepala daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra. Namun, Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sebagai pengganti RPJMD yang dipakai oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra periode 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026, memuat konsep yaitu **Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dari perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang berkarakter dan adaptif, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan SDA dan Lingkungan hidup.

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.1 Keselarasan Antara Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya

Dalam mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor
2. Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap
3. Meningkatnya Akses Air Minum Aman
4. Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman
5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kebina margaan dan keciptakarya (beserta seluruh unit kerja yang terkait) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tanggung jawab penting Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya adalah pengelolaan opini dan aspirasi publik terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang kebinamargaan dan keciptakarya. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan sesuai tugas dan fungsi sebagai peran strategis dinas dalam pengelolaan dan pelayanan infrastruktur daerah di bidang bina marga dan cipta karya yang inklusif, terintegrasi dan kolaboratif guna menopang arus informasi kebijakan kepala daerah yang dapat dirujuk sebagaimana telah dijabarkan pada RPD 2024-2026 dan setiap tahun dioperasionalkan dalam RKPD.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi		Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap	%	N/A	N/A	69,14	69,44	70,29	70,29
	Sasaran 1.1	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	43,50	44,24	45,09	45,39	46,24	46,24
	Sasaran 1.2	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	92,49	92,35	93,20	93,50	94,35	94,35
			Persentase Kondisi Jembatan Provinsi Baik	%	88,22	90,33	91,18	91,48	92,33	92,33
2	Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya		Indeks Pelayanan Keciptakarya	%	N/A	N/A	33,77	38,69	43,25	43,25
	Sasaran 2.1	Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Persentase Akses Air Minum Aman	%	36,93	38,93	40,93	42,93	44,93	44,93
	Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman	%	9,94	10,46	10,97	11,49	12,00	12,00
	Sasaran 2.3	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi	%	18,35	30,10	49,42	61,65	72,82	72,82

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar							

Tujuan dan Sasaran serta indikator yang berkaitan dengan **kesekretariatan** Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-		60	61	62	62
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95,75		95,80	95,85	95,90	95,90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,09		3,10	3,11	3,12	3,12

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap

Definisi: Persentase jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap merupakan pengukuran jalan untuk menentukan persentase jalan sesuai standar kolektor dan dalam kondisi mantap dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi wewenang provinsi Jawa tengah. Adapun rumus Persentase jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap adalah rata-rata penjumlahan dari Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap

A. Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor

Definisi: Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Tengah yang sudah sesuai dengan standar jalan kolektor yaitu memiliki lebar 7 meter dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Rumus Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor adalah Panjang jalan sesuai standar jalan kolektor dibandingkan keseluruhan jalan wewenang Provinsi Jawa Tengah.

B. Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap

Definisi: Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Rumus Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap adalah Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan wewenang Provinsi Jawa Tengah.

2. Indeks Pelayanan Keciptakarya

Definisi: Indeks Pelayanan Keciptakarya merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar cipta karya yaitu: 1) Persentase Akses Air Minum Aman; 2) Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman; serta 3) Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar. Adapun rumus penghitungan indikator berdasarkan rata-rata realisasi ketiga sub-indikator

A. Persentase Akses Air Minum Aman

Definisi: Persentase Akses Air Minum Aman merupakan pengukuran terhadap air minum yang dikonsumsi masyarakat Jawa Tengah dalam keadaan layak dan aman. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Akses Air Minum Aman adalah Jumlah penduduk yang terakses Air Minum Aman dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk Jawa Tengah.

B. Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman

Definisi: Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman merupakan pengukuran terhadap pengolahan air limbah domestik masyarakat Jawa Tengah dalam keadaan layak dan aman.. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman adalah Jumlah penduduk yang terakses Pengolahan Air Limbah Domestik Aman dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk Jawa Tengah.

C. Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar

Definisi: Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar merupakan pengukuran terhadap bangunan Gedung Milik Pemerintah daerah dalam kondisi sesuai standart pembangunan. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar adalah Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar dibandingkan keseluruhan Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Jawa Tengah.

4.2 MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026

Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	9	Jalan berada di daerah ekstrem di pinggir jurang, gunung, bukit	Jalan tidak sesuai dengan standar kolektor	Penyusunan kajian tentang kondisi jalan yang berada di daerah ekstrem di pinggir jurang, gunung atau bukit untuk menemukan solusi dalam rangka mencapai standar jalan kolektor	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				Masalah pembebasan lahan		Koordinasi dengan stakeholder terkait proses pembebasan lahan		
Terjaganya kondisi permukaan jalan mantap	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	Kerusakan jalan di luar perencanaan	9	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Pemberian signage dan rambu serta infrastruktur pengaman jalan		
				Pengguna jalan melebihi standar (<i>overload</i>)		Koordinasi dengan stakeholder terkait (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah) untuk mengatur kendaraan <i>overload/over dimension</i> yang melintasi jalan rawan rusak		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan di bidang kebinamargaan dan keciptakarya.

Sebagai upaya strategis dalam mewujudkan tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yakni meningkatkan kualitas jalan provinsi dan pelayanan keciptakarya, strategi yang telah dirumuskan harus dapat diterjemahkan oleh setiap bidang dan sekretariat, termasuk seluruh unit kerja di bawahnya, berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

Strategi 1: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar

Dengan mengoptimalkan pelayanan di bidang kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan yang sesuai standar, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah akan mewujudkan strategi tersebut melalui arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Pelebaran jalan sesuai standar jalan kolektor (lebar 7 m);
- b. Peningkatan kualitas struktur jalan sesuai standar jalan kolektor (MST/Muatan Sumbu Terberat 8 ton);
- c. Pembangunan jalan baru (relokasi) ruas jalan yang berpotensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak;
- d. Pembebasan tanah/lahan yang diperlukan;
- e. Perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
- f. Optimalisasi bangunan pelengkap jalan (saluran, dinding penahan tanah dan bahu jalan);
- g. Rehabilitasi ruas jalan yang sudah melampaui umur rencana.

Strategi 2 : Optimalisasi Pemeliharaan Permukaan Jalan dan Jembatan Untuk Mempertahankan Kondisi Mantap

Upaya pemeliharaan permukaan jalan dan jembatan ini dilakukan agar dapat mempertahankan kinerja struktur permukaan jalan dan jembatan yang ada. Hal ini dilakukan dengan periodisasi rutin di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya dengan arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Pengadaan peralatan pendukung pemeliharaan rutin;
- b. Perbaikan kerusakan yang terjadi pada jembatan;
- c. Rehabilitasi ruas jalan yang sudah melampaui umur rencana;
- d. Pelebaran jembatan yang sesuai standar;

Strategi 3 : Peningkatan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Melalui Akses Jaringan Perpipaan dan Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Upaya peningkatan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan potensi jaringan perpipaan dan penyaluran air minum curah yang dilaksanakan secara bertahap oleh lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah beserta unit kerja dan rekanannya, yang tetap memperhatikan peningkatan kualitas dan kapasitas di setiap periode waktu tertentu. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Bimbingan teknis kepada Kelompok Pengelola SPAM dan Sanitasi (KPSPAMS);
- b. Bimbingan teknis kepada PDAM Kabupaten/Kota;
- c. Hibah hasil pembangunan SPAM Desa di daerah dengan Kemiskinan Ekstrem;
- d. Pembangunan JDU (Jaringan Distribusi Utama) SPAM Regional ke daerah layanan;
- e. Peningkatan JDU (Jaringan Distribusi Utama) SPAM Regional.

Strategi 4 : Peningkatan Akses Air Limbah Domestik yang Layak dan Aman

Pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan sistem pelayanan sanitasi layak dengan pendekatan regional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mengupayakan peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan rutin. Strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Pembangunan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) regional;

- b. Pembinaan teknis dan pendampingan pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah;
- c. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa (Hibah).

Strategi 5 : Optimalisasi Hasil Penyelenggaraan pada Bangunan Gedung Milik Daerah

Upaya peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan pada bangunan Gedung milik negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk mendukung tujuan peningkatan kualitas pelayanan keciptakaryaan melalui standarisasi bantuan teknis pembangunan BGMD (Bangunan Gedung Milik Daerah) yang dilakukan secara rutin, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.
- b. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan gedung milik daerah sesuai standar.

Strategi 6: Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jasa Konstruksi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Optimalisasi potensi SDM yang mendukung peningkatan kompetensi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan terutama di sektor sumber daya manusia, dilakukan dengan arah kebijakan yaitu Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.

Strategi 7: Optimalisasi Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan pembangunan yang merata diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penentuan standar harga satuan pekerjaan konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya di lingkup wilayah tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melalui arah kebijakan yaitu Penyusunan HSPK (Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi) yang mengikuti perkembangan pasar.

Ringkasan keterkaitan, relevansi, dan konsistensi antara pernyataan yang telah ditetapkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Pelebaran jalan sesuai standar jalan kolektor (7m);
			Peningkatan kualitas struktur jalan sesuai standar jalan kolektor (MST 8 ton);
			Pembangunan jalan baru (relokasi) ruas jalan yang berpotensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.
			Pembebasan tanah/lahan yang diperlukan
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap	Optimalisasi Pemeliharaan permukaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi mantap	Perbaiki kerusakan- kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
			Optimalisasi bangunan pelengkap jalan (saluran , dinding penahan tanah dan bahu jalan);
			Rehabilitasi ruas jalan yang sudah melampaui umur rencana;
			Pengadaan peralatan pendukung pemeliharaan rutin;
			Perbaiki kerusakan yang terjadi pada jembatan;
			Rehabilitasi ruas jalan yang sudah melampaui umur rencana;
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaannya	Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Peningkatan akses air minum yang layak dan aman melalui akses jaringan perpipaan dan penyaluran air minum curah lintas kab./kota	Pelebaran jembatan yang sesuai standar.
			Pembangunan JDU SPAM Regional ke daerah layanan;
			Peningkatan JDU SPAM Regional;
			Bimbingan teknis kepada Kelompok Pengelola SPAM dan sanitasi (KPSPAMS);
			Bimbingan teknis kepada PDAM Kabupaten/Kota;
Hibah hasil pembangunan SPAM Desa di daerah dengan Kemiskinan Ekstrem (PKE).			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman	Peningkatan akses air limbah domestik yang layak dan aman	Pembangunan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) Regional;	
			Pembinaan teknis dan pendampingan pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah;	
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa (Hibah).
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Optimalisasi hasil penyelenggaraan pada Bangunan Gedung Milik Daerah	Penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah;	
				Fasilitasi bantuan teknis pembangunan gedung milik daerah sesuai standar.
		Peningkatan kompetensi SDM bidang jasa konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah		Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.
		Optimalisasi Standar harga satuan pekerjaan konstruksi di Provinsi Jawa Tengah		Penyusunan HSPK (Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi) yang mengikuti perkembangan pasar.

Dalam pelaksanaannya, program-program dalam dokumen pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah merupakan program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah. Untuk mewujudkan pembangunan di Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai andil untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam agenda mensukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun beberapa inovasi yang menjadi andil bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya bagi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Pemanfaatan Aspal Buton Dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan

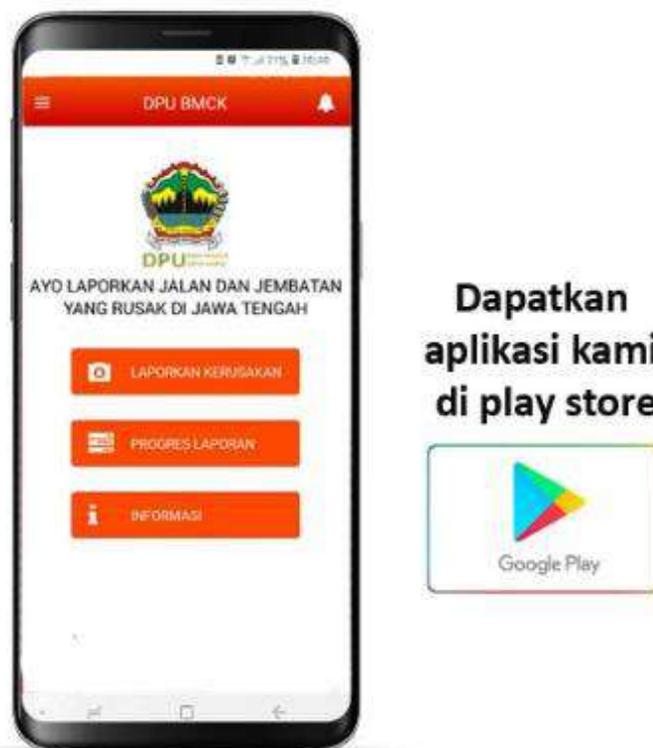




Gambar 5.1 Pemanfaatan Asbuton oleh DPU BMCK Jateng

Gambar di atas merupakan gambar pemanfaatan Asbuton atau Aspal Buton sesuai dengan arahan Gubernur berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 000/4443 tanggal 28 September 2022 Tentang Penggunaan Aspal Buton dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jawa Tengah. Hal ini sebagai komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam mengoptimalkan produk dalam negeri yaitu Implementasi penggunaan bahan material Aspal dari Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pengelolaan Laporan Kerusakan Jalan dan Jembatan Melalui Aplikasi Jalan Cantik



Gambar 5.2 Interface Jalan Cantik

Jalan cantik adalah aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi Jalan Cantik dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (DPU BINMARCIPKA JATENG) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah melalui aplikasi tersebut. Masyarakat umum bisa melaporkan situasi kerusakan jalan atau jembatan yang dilihat melalui aplikasi yang tersedia di *playstore*. Laporan yang dikirimkan oleh masyarakat bisa dipantau melalui aplikasi dari proses pengerjaan jalan hingga selesai akan dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Jalan Cantik.

3. Pengelolaan Layanan Dasar Air Bersih Melalui SIMANISCIKA



Gambar 5.3 *Interface Simanis Cika*

Simanis Cika merupakan akronim dari Sistem Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi Bidang Keciaptakarya dalam bentuk aplikasi untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi tersebut disiapkan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat melalui <http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

Aplikasi Simanis Cika sebagai sarana dalam memberikan informasi, monitoring dan evaluasi target juga realisasi akses air minum maupun sanitasi seluruh kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. Data yang ditampilkan oleh SIMANIS CIKA ini cukup mendetail, seperti target sanitasi yang layak, belum layak dan aman. Target-target tersebut akan ditampilkan per tahun sehingga dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi. Dengan mengetahui deviasi tersebut, SIMANIS CIKA dapat dijadikan pedoman Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Akses Layanan Sanitasi maupun Air Minum di wilayahnya.

4. Penanganan Kerusakan Jalan Melalui TAMBAL BENAR Secara Cepat Maksimal 24 Jam

Tambal Benar merupakan *tagline* dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam memperbaiki jalan yang berlubang di area Provinsi Jawa Tengah. *Tagline* ini merupakan semangat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya untuk memenuhi layanan kebinamargaan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5.4 Standard Operational Procedure (SOP) Penanganan Lubang oleh Balai Pengelola Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Gambar 5.5 Penanganan Kerusakan Jalan

5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Sepanjang Jalan Ruas Kewenangan Provinsi dalam Upaya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan



Gambar 5.6 Kegiatan Kelompok Masyarakat Bina Marga/MAS BIMA (Pekerjaan Penghamparan CAP di Ruas Gombang – Sempor – Ketileng Ruas 156, Kabupaten Kebumen)

Kelompok Masyarakat Bina Marga atau Pokmas Bima merupakan kelompok masyarakat yang bekerja di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang membantu Balai Pengelola jalan terkait beberapa jenis penanganan rutin yang menjadi kewenangan tenaga kelompok masyarakat, diantaranya adalah Pengendalian Tanaman (babat rumput dan penanaman pohon), Galian Manual (galian saluran dan sodetan), Perapihan Bahu Jalan (pembersihan dan pengeprasan bahu jalan), serta Pengecatan (obyek pada patok, pohon ayoman, dan jembatan). Program ini

juga merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5.7 Kegiatan Pengarahan Pokmas BPJ Magelang (Wilayah Magelang 2) di Kabupaten Purworejo

6. Pohon Ayoman yang Berkarakter / Bertema

Setiap daerah di Jawa Tengah memiliki karakteristik tumbuhan yang dapat menjadi daya tarik pengguna jalan, berupa flora atau tumbuhan khas yang menjadi maskot kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jenis dan macam tumbuhan ini melengkapi kantil yang ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah daftar tumbuhan yang ditetapkan sebagai flora identitas ke-35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang disadur dari Buku **“Penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Manajemen Lingkungan”** karya Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.

- 1) Kota Magelang: Dadap serep (*Erythrina orientalis*);
- 2) Kota Tegal: Widuran (*Zizipus mauritiana*) yang disebut juga widara atau Bidara;
- 3) Kota Salatiga: Rejasa (*Elaeocarpus grandiflorus*) atau disebut juga anyang-anyang atau ki sambit;
- 4) Kota Surakarta: Sirih (*Piper betle L*);
- 5) Kota Pekalongan: Bambu Wulung (*Gigantochloa atroviolacea* Widjaya);
- 6) Kota Semarang: Asem Jawa (*Tamarindus indica Linn*);
- 7) Kabupaten Kudus: Jambu Bol (*Syzygium mallaccense*);

- 8) Kabupaten Sukoharjo: Turi (*Sesbania grandiflora*);
- 9) Kabupaten Klaten: Kemuning (*Murraya paniculata L. lack*) atau disebut kayu gading;
- 10) Kabupaten Batang: Nangka (*Artocarpus heterophyllus*);
- 11) Kabupaten Karanganyar: Duku Mateseh (*Lansium domesticum* kultivar Mateseh);
- 12) Kabupaten Purbalingga: Duwet (*Syzygiurn cumini*) atau disebut Jamblang dan Juwet;
- 13) Kabupaten Temanggung: Tembakau Gober Kemloko (*Nicotiana tabaccum* kultivar kemloko);
- 14) Kabupaten Sragen: Salam (*Szygium polyanthum*);
- 15) Kabupaten Pekalongan: Melati Gambir (*Jasminum multiflorum* *Burm.f*);
- 16) Kabupaten Demak: Belimbing Demak (*Averrhoa carambola* kultivar Demak);
- 17) Kabupaten Tegal: Mangga Wirasangka (*Mangifera indica* kultivar Wirasangka);
- 18) Kabupaten Wonosobo: Pepaya Dieng (*Carica pubescens* *Lenne & K Koch*);
- 19) Kabupaten Kendal: Kendal (*Cordia bantamensis*);
- 20) Kabupaten Semarang Klengkeng atau Lengkeng (*Dimocarpus logan* *Lour*);
- 21) Kabupaten Rembang: Kawista (*Feroniella lucida*) atau disebut Kawis;
- 22) Kabupaten Jepara: Durian Petruk (*Dario zybethinus* kultivar Petruk);
- 23) Kabupaten Purworejo: Manggis Kaligesing (*Garcinia mangostana* var. *Kaligesing*);
- 24) Kabupaten Pemalang: Srigading (*Nyctanthes arbortristis*);
- 25) Kabupaten Magelang: Salak Nglumut (*Salacca zalacca* kultivar Nglumut);
- 26) Kabupaten Banjarnegara: Kayu Manis Gina (*Cinnamomum cassia*);
- 27) Kabupaten Kebumen: Kelapa Genjah Entog (*Cocos nucifera* kultivar genjah);
- 28) Kabupaten Banyumas: Nagasari (*Mesua ferrea L*);
- 29) Kabupaten Pati: Kapuk Randu (*Ceiba Pentandra L*);
- 30) Kabupaten Brebes: Bawang Merah Bima Brebes (*Allulium cepa* kultivar *Bima Brebes*);
- 31) Kabupaten Wonogiri: Ketela Pohon (*Manihot esculenta*);
- 32) Kabupaten Blora: Jati Blora (*Tectona grandis*);
- 33) Kabupaten Grobogan: Lombok Besar (*Capsicum annum*);

34) Kabupaten Cilacap: Sukun Cilacap (*Artocarpus altilis Parkinson*).

Pohon pelindung di jalan raya merupakan jenis pohon yang biasa dijadikan sebagai pohon peneduh di sepanjang jalan raya, antara lain:

1) Pohon Tanjung

Meskipun batangnya tidak terlalu besar dan terlalu tinggi, namun pohon ini sangat rindang dengan tajuk luas dan tumbuh secara simetris. Daunnya tidak mudah rontok, rantingnya juga tidak terlalu besar dan tidak mudah patah. Pohon ini bisa mencapai tinggi 15 meter.

2) Ketapang Kencana (*terminalia mantaly*)

Pohon asal Madagaskar ini berwujud ramping, namun memiliki ranting membentang dan bertingkat sehingga tepat untuk dijadikan sebagai peneduh halaman. Ketapang Kencana mampu tumbuh dengan ketinggian mencapai 10 - 20 m dengan batang berdiri tegak dan rapi. Pohon ini juga memiliki ranting ramping yang tumbuh. Daun-daun kecilnya juga subur bergerombol seperti membentuk payung sehingga bisa melindungi tanaman yang ada di bawahnya. Daun pohon ini berwarna hijau terang ketika berumur muda, dan akan tetap terlihat hijau meskipun tengah terjadi pergantian musim. Selain itu, pohon ini juga memiliki bunga berwarna kehijauan dan buah kecil berukuran sekitar 1,5 cm.

3) Pohon Beringin

Pohon beringin tidak tumbuh ke atas namun tumbuhnya melebar, mengembang dan terkadang kembali ke bawah menjuntai. Itulah mengapa sebabnya pohon beringin ini cocok dijadikan sebagai pohon peneduh. Tanaman beringin memiliki kemampuan sebagai tanaman konservasi mata air dan penguat lereng alami. Hal tersebut memiliki kemampuan hidup dan beradaptasi dengan bagus pada berbagai kondisi lingkungan. Beringin juga merupakan tanaman yang memiliki umur sangat tua, tanaman tersebut dapat hidup dalam waktu hingga ratusan tahun.

4) Pohon Mangga

Ini paling banyak ditanam di kompleks perumahan karena dapat tumbuh dengan cepat, rimbun, buah bisa dimakan, akar ke dalam tanah, tidak merusak lantai dan tembok. Pohon ini umumnya mempunyai tinggi 4-10 meter karena ditanam dari cangkokan bukan dari biji. Sebenarnya pohon ini bisa tinggi 10-40 meter dengan lebar batang yang cukup besar. Beberapa jenis pohon mangga seperti harum manis memiliki sedikit ranting-ranting kecil (kurang rimbun), karena cabangnya sedikit namun tumbuh terus sehingga kadang pertumbuhan cabang melengkung dan turun ke bawah karena tidak kuat menahan beban, apalagi saat berbuah.

5) Glodokan Tiang (*Polyalthia longifolia*)

Tumbuhan yang berasal dari India ini umumnya ditanam karena keefektifannya dalam mengurangi polusi suara. Kenampakan pohon ini berupa piramida simetris dengan cabang seperti pendulum dan daun lanset dengan tepi bergelombang. Pohon ini dapat tumbuh hingga mencapai 30 kaki. Akar pada glodokan ini cukup menembus ke dalam, tidak dangkal, tetapi juga tidak menjalar dengan ekstensif yang bisa mengganggu struktur seperti trotoar, jalan dan bangunan di dekatnya. Sehingga selain terdapat di hutan kota pohon ini biasa ditanam di sepanjang pinggiran jalan sebagai peneduh jalan. Habitat dari tanaman ini terdapat di dataran rendah dengan tanah yang gembur.

6) Pohon Trembesi

Pohon ini banyak ditanam sebagai peneduh jalan. Pohonnya besar seperti payung. Akar, batang, dan dahannya sangat besar seperti raksasa pohon yang indah. Usia pohon trembesi bisa mencapai ratusan tahun. Naungan daun pohon trembesi bisa menurunkan suhu udara sekitarnya. Kesejukan itu juga disebabkan pohon trembesi mampu menyerap gas karbon dioksida di udara. Pohon trembesi sanggup menyerap 28 ton gas karbon dioksida setiap tahunnya, sehingga di sepanjang jalan kini banyak ditanami pohon trembesi.

7) Pohon Mahoni

Pohon ini cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh jalan karena mampu tumbuh hingga puluhan tahun, tidak mudah terkena hama atau penyakit, tidak mudah tumbang dengan struktur kayu yang kuat tumbuh lurus ke atas dengan tajuk tinggi di atas batas ketinggian kendaraan.

8) Pohon Kiara Payung (*Fellicium Decipiens*)

Pohon tropis yang berasal dari Afrika Timur dan India Selatan, disebut di juga *Japanese Fern Tree*. Pohon ini sangat baik sebagai pohon peneduh halaman rumah karena selain sangat rindang dan bertajuk luas. Kemampuan menyerap CO₂ sangat bagus, tingginya dapat mencapai 11 meter, namun yang sering ditemui 4-8 meter saja.

9) Pohon Angsana (*Pterocarpus indicus*)

Angsana atau yang dikenal dengan nama sonokembang, merupakan salah satu pohon asli semenanjung Malaya yang banyak digunakan bagian kayunya. Kayu dari pohon angsana ini memiliki nilai ekonomi yang baik di pasar dunia. Tanaman ini biasanya menghiasi pinggiran jalan raya sebagai pohon peneduh. Tinggi pohon Angsana bisa mencapai 40 meter dan diameter mencapai 350 cm.

10) Pohon Asam Jawa

Tanaman asam jawa memang sangat baik pertumbuhannya di daerah yang memiliki iklim tropis, Tanaman ini diperkirakan berasal dari wilayah Afrika timur, penyebarannya hingga Asia Tropis, Karibia dan Amerika latin. Tanaman ditanam untuk keperluan komoditi dan pohon peneduh. Dengan bentuk pohon yang tinggi, rindang, serta berakar kuat, tanaman Asam Jawa sengaja ditanam untuk memperindah lingkungan dan pohon peneduh di jalan-jalan kota dan jalan raya. Pohon asam juga bisa berperan sebagai bahan penghijauan dan untuk menahan angin, bisa juga digunakan untuk memperbaiki kawasan yang gersang dan tandus.

11) Johar

Johar merupakan pohon yang sangat umum ditanam di pinggir jalan sebagai tanaman peneduh. Johar ini sangat mudah dikenali dengan bunganya yang berwarna kuning dan daun majemuk menyirip ditambah untaian buah polongnya yang biasa kering di tangkainya. Johar termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan mampu beradaptasi pada daerah kering, sehingga sering dimanfaatkan sebagai pohon pelindung atau sebagai tanaman perintis.

12) Palem

Palem adalah pohon yang tidak bercabang. Hampir mirip dengan pohon kelapa, dan bisa tumbuh sampai 20 meter.

13) Flamboyan

Pohon ini masa berbunganya memang tergolong jarang, sekali dalam setahun. Persisnya terjadi pada masa pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Saat itulah, bunganya bermekaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai kebijakan hingga program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi. Tabel 6.1 di bawah ini merupakan penjabaran lengkap terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran OPD

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
												2024		2025		2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)													54.882.123.000		21.387.759.000		24.911.248.000		101.181.130.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
	Indeks Pelayanan Keciptakaryaan										%	33,77			38,69		43,25		43,25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
		Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman *											8.448.123.000		7.074.159.000		19.770.448.000		35.292.730.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
			Persentase akses air limbah domestik aman *								%	10,97	8.448.123.000	11,49	7.074.159.000	12	19.770.448.000	12	35.292.730.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
				1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH **								8.448.123.000		7.074.159.000		19.770.448.000		35.292.730.000					
						Persentase akses air limbah domestik layak **					%	93,58	8.448.123.000	95,18	7.074.159.000	96,78	19.770.448.000	96,78	35.292.730.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung				
				1.03.05.1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ***						8.448.123.000		7.074.159.000		19.770.448.000		35.292.730.000					
								Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N ***			Orang	34724662	8.448.123.000	35.500.068	7.074.159.000	36282533	19.770.448.000	36282533	35.292.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN				
				1.03.05.1.01.0015				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									310.000.000		460.000.000		770.000.000			
									Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen) ****		Dokumen	0	-	2	310.000.000	2	460.000.000	4	770.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; KOTA SEMARANG			
				1.03.05.1.01.0013				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat					7.494.000.000		5.800.000.000		18.335.000.000		31.629.000.000					
									Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat ****		RT/KK	0	-	0	-	500	2.085.000.000	500	2.085.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; SRAGEN, KOTA SURAKARTA			
									Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (m3) ****		m3	35	5.544.000.000	35	5.800.000.000	35	16.250.000.000	35	27.594.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	BANJARNEGARA; Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; PURBALINGGA			
									Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		m2	2.000	1.950.000.000	0	-	0	-	2.000	1.950.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	BANJARNEGARA; Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; PURBALINGGA			
				1.03.05.1.01.0014				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					954.123.000		964.159.000		975.448.000		2.893.730.000					
									Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota) ****		Kabupaten /Kota	18	954.123.000	18	964.159.000	18	975.448.000	54	2.893.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung			
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman *											48.384.000.000		14.313.600.000		5.140.800.000		67.838.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
			Persentase akses air minum aman *								%	40,93	48.384.000.000	42,93	14.313.600.000	44,93	5.140.800.000	44,93	67.838.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya				
				1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM **								48.384.000.000		14.313.600.000		5.140.800.000		67.838.400.000					
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan **					%	54,82	48.384.000.000	57,82	14.313.600.000	60,82	5.140.800.000	60,82	67.838.400.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				1.03.03.1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ***						48.384.000.000		14.313.600.000		5.140.800.000		67.838.400.000		
								Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) ***			Orang	20134323	48.384.000.000	21.236.165	14.313.600.000	22338007	5.140.800.000	22338007	67.838.400.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
				1.03.03.1.01.0017					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				48.384.000.000		14.313.600.000		5.140.800.000		67.838.400.000		
										Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa ****	Lokasi	75	48.384.000.000	22	14.313.600.000	8	5.140.800.000	105	67.838.400.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; PEMALANG, BREBES, GROBOGAN, DEMAK, KLATEN, SRAGEN, REMBANG, BLORA, WONOGIRI, KEBUMEN, PURWOREJO, MAGELANG, BANJARNEGARA, WONOSOBO, BANYUMAS, PURBALINGGA, CILACAP, SEMARANG, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KUDUS, JEPARA, BATANG, KARANGANYAR, TEMANGGUNG, KENDAL, SUKOHARJO
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (LH)													52.109.134.000		50.977.068.000		35.068.242.000		138.154.444.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Indeks Pelayanan Keciptakarya										%	33,77		38,69		43,25		43,25		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman *											52.109.134.000		50.977.068.000		35.068.242.000		138.154.444.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			Persentase akses air minum aman *								%	40,93	52.109.134.000	42,93	50.977.068.000	44,93	35.068.242.000	44,93	138.154.444.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM **								52.109.134.000		50.977.068.000		35.068.242.000		138.154.444.000		
						Persentase akses air minum layak **					%	92,42	4.069.634.000	93,94	1.929.568.000	95,45	1.846.342.000	95,45	7.845.544.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				1.03.03.1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ***						4.069.634.000		1.929.568.000		1.846.342.000		7.845.544.000		
								Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) ***			Orang	33944074	4.069.634.000	34.502.341	1.929.568.000	35056934	1.846.342.000	35056934	7.845.544.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
				1.03.03.1.01.0015					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2.386.184.000		321.238.000		338.172.000		3.045.594.000		
										Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispm, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen) ****	Dokumen	4	2.386.184.000	1	321.238.000	1	338.172.000	6	3.045.594.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; KOTA SEMARANG
				1.03.03.1.01.0016					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.683.450.000		1.608.330.000		1.508.170.000		4.799.950.000		
										Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota) ****	Kabupaten /kota	35	1.683.450.000	35	1.608.330.000	35	1.508.170.000	105	4.799.950.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota **					%	100	48.039.500.000	100	49.047.500.000	100	33.221.900.000	100	130.308.900.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				1.03.03.1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ***						48.039.500.000		49.047.500.000		33.221.900.000		130.308.900.000		
								Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota ***			Liter	15	48.039.500.000	15	49.047.500.000	15	33.221.900.000	15	130.308.900.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
				1.03.03.1.01.03					Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan ****				48.039.500.000		49.047.500.000		33.221.900.000		130.308.900.000		
									Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik) ****		Liter	10	24.192.000.000	15	25.200.000.000	10	17.630.000.000	35	67.022.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; KEBUMEN; PURWOREJO
									Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik) ****		Liter	5	23.847.500.000	5	23.847.500.000	5	15.591.900.000	15	63.286.900.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung; BREBES
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (IRB)													27.207.423.000		4.909.708.000		5.724.391.000		37.841.522.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Indeks Pelayanan Keciptakarya										%	33,77			38,69		43,25		43,25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah *											27.207.423.000		4.909.708.000		5.724.391.000		37.841.522.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar *								%	49,42	27.207.423.000	61,65	4.909.708.000	72,82	5.724.391.000	72,82	37.841.522.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG **								23.159.123.000		644.159.000		855.448.000		24.658.730.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah **					%	5,83	22.655.000.000	5,83	330.000.000	5,83	330.000.000	5,83	23.315.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				1.03.08.1.01			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ***						22.655.000.000		330.000.000		330.000.000		23.315.000.000		
								Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N ***			Lokasi	60	22.655.000.000	60	330.000.000	60	330.000.000	180	23.315.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
				1.03.08.1.01.0019					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				22.325.000.000		-		-		22.325.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ****	Dokumen	2	22.325.000.000	0	-	0	-	2	22.325.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
				1.03.08.1.01.0018					Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				180.000.000	180.000.000	180.000.000			540.000.000			
										Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi ****	Dokumen	60	180.000.000	60	180.000.000	60	180.000.000	180	540.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
				1.03.08.1.01.0012					Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				150.000.000	150.000.000	150.000.000			450.000.000			
										Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat ****	Orang	160	100.000.000	160	100.000.000	160	100.000.000	160	300.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
										Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara ****	Orang	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	150.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis **					%	11,94	504.123.000	12,23	314.159.000	11,17	525.448.000	11,17	1.343.730.000		
				1.03.08.1.01			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ***						504.123.000	314.159.000	525.448.000			1.343.730.000			
								Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n ***			Lokasi	123	504.123.000	126	314.159.000	115	525.448.000	364	1.343.730.000		
				1.03.08.1.01.01					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ****				504.123.000	314.159.000	525.448.000			1.343.730.000			
										Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n ****	Dokumen	1	504.123.000	1	314.159.000	1	525.448.000	3	1.343.730.000		Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
				1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI **								4.048.300.000	4.265.549.000	4.868.943.000			13.182.792.000			
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi **					%	33,33	200.000.000	66,67	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				1.03.11.1.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ***						200.000.000	200.000.000	200.000.000			600.000.000			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi ***			Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
				1.03.11.1.01.0012					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200.000.000	200.000.000	200.000.000			600.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi ****	Orang	320	200.000.000	320	200.000.000	320	200.000.000	960	600.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi **					%	43,49	3.848.300.000	46,98	4.065.549.000	51,09	4.668.943.000	51,09	12.582.792.000	Balai Jasa Konstruksi	
				1.03.11.1.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ***						2.635.445.000		2.772.051.000		3.277.469.000		8.684.965.000		
								Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi ***			Orang	10579	2.635.445.000	11429	2.772.051.000	12429	3.277.469.000	34437	8.684.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				1.03.11.1.01.0011					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.467.445.000		1.545.051.000		1.809.469.000		4.821.965.000		
										Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) ****	Orang	1600	1.467.445.000	1650	1.545.051.000	1800	1.809.469.000	5050	4.821.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
				1.03.11.1.01.0014					Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.168.000.000		1.227.000.000		1.468.000.000		3.863.000.000		
										Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi ****	Orang	800	1.168.000.000	850	1.227.000.000	1000	1.468.000.000	2650	3.863.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
				1.03.11.1.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi ***						750.000.000		807.500.000		856.876.000		2.414.376.000		
								Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi ***			Kegiatan	5	750.000.000	5	807.500.000	5	856.876.000	15	2.414.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				1.03.11.1.02.0008					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				100.000.000		125.000.000		105.000.000		330.000.000		
										Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI ****	Orang	80	100.000.000	80	125.000.000	80	105.000.000	240	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
				1.03.11.1.02.0009					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				650.000.000		682.500.000		751.876.000		2.084.376.000		
										Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi ****	Dokumen	2	295.120.000	2	309.876.000	2	340.864.000	2	945.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
										Jumlah pengadaan Buku Konstruksi ****	Buah	125	25.000.000	125	26.250.000	125	30.000.000	125	81.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
										Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani ****	Kegiatan	1	50.680.000	1	53.214.000	1	58.536.000	1	162.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
										Jumlah stand pameran yang dilaksanakan ****	Unit	4	279.200.000	4	293.160.000	4	322.476.000	4	894.836.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
				1.03.11.1.03			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ***						462.855.000		485.998.000		534.598.000		1.483.451.000		
								Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi ***			Dokumen	1	462.855.000	1	485.998.000	1	534.598.000	1	1.483.451.000		
				1.03.11.1.03.0006					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				462.855.000		485.998.000		534.598.000		1.483.451.000		
										Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi ****	Laporan	4	462.855.000	4	485.998.000	4	534.598.000	4	1.483.451.000		Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													118.786.609.000		110.493.414.000		106.749.339.000		336.029.362.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	60		61		62		62		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah *											118.136.609.000		109.843.414.000		106.001.339.000		333.981.362.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Indeks Kepuasan Masyarakat *								Angka	95,8	118.136.609.000	95,85	109.843.414.000	95,9	106.001.339.000	95,9	333.981.362.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								118.136.609.000		109.843.414.000		106.001.339.000		333.981.362.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	1.603.457.000	100	1.534.042.000	100	1.607.248.000	100	4.744.747.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***							263.010.000		264.000.000		268.000.000		795.010.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***					%	100	263.010.000	100	264.000.000	100	268.000.000	100	795.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	3	28.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				42.500.000		43.000.000		45.000.000		130.500.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	42.500.000	1	43.000.000	1	45.000.000	3	130.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				7.550.000		8.000.000		10.000.000		25.550.000		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	7.550.000	1	8.000.000	1	10.000.000	3	25.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****				29.960.000		30.000.000		30.000.000		89.960.000		
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	2	29.960.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	89.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ****				3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000		
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	672	3.500.000	672	3.500.000	672	3.500.000	2016	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				170.000.000		170.000.000		170.000.000		510.000.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Dokumen	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	36	510.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				491.737.000		540.861.000		594.148.000		1.626.746.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	26	491.737.000	26	540.861.000	26	594.148.000	78	1.626.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				121.500.000		134.000.000		147.000.000		402.500.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	12	121.500.000	12	134.000.000	12	147.000.000	36	402.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				366.237.000		402.861.000		443.148.000		1.212.246.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	366.237.000	2	402.861.000	2	443.148.000	6	1.212.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						848.710.000		729.181.000		745.100.000		2.322.991.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***				Unit	64	848.710.000	66	729.181.000	68	745.100.000	198	2.322.991.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				144.710.000		159.181.000		175.100.000		478.991.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****		Unit	6	144.710.000	6	159.181.000	6	175.100.000	18	478.991.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				600.000.000		500.000.000		500.000.000		1.600.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	8	600.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	24	1.600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				104.000.000		70.000.000		70.000.000		244.000.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	45	104.000.000	47	70.000.000	49	70.000.000	141	244.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **				%	100	99.535.648.000	100	91.231.773.000	100	86.126.730.000	100	276.894.151.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***						82.305.760.000		77.305.760.000		72.305.760.000		231.917.280.000		
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***				Dokumen	45	82.305.760.000	45	77.305.760.000	45	72.305.760.000	135	231.917.280.000	SUBBAG KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				80.000.000.000		75.000.000.000		70.000.000.000		225.000.000.000		
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****		Orang	477	80.000.000.000	425	75.000.000.000	366	70.000.000.000	366	225.000.000.000	SUBBAG KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				1.865.760.000		1.865.760.000		1.865.760.000		5.597.280.000		
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****		Dokumen	12	1.865.760.000	12	1.865.760.000	12	1.865.760.000	36	5.597.280.000	SUBBAG KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.02.07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ****				440.000.000		440.000.000		440.000.000		1.320.000.000		
									Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran teran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran teran perangkat daerah ****		Laporan	19	440.000.000	19	440.000.000	19	440.000.000	57	1.320.000.000	SUBBAG KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						558.000.000		558.000.000		558.000.000		1.674.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***			Dokumen	13	558.000.000	13	558.000.000	13	558.000.000	39	1.674.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				558.000.000		558.000.000		558.000.000		1.674.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	13	558.000.000	13	558.000.000	13	558.000.000	39	1.674.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***					641.250.000		641.250.000		641.250.000		1.923.750.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***			%	100	641.250.000	100	641.250.000	100	641.250.000	100	1.923.750.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****				-		-		-		-		
										Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				641.250.000		641.250.000		641.250.000		1.923.750.000		
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	590	641.250.000	590	641.250.000	590	641.250.000	1770	1.923.750.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					2.422.000.000		2.322.000.000		2.322.000.000		7.066.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	2.422.000.000	100	2.322.000.000	100	2.322.000.000	100	7.066.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				120.000.000		110.000.000		110.000.000		340.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	120.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	3	340.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				228.000.000		138.000.000		138.000.000		504.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	228.000.000	1	138.000.000	1	138.000.000	3	504.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				84.000.000		84.000.000		84.000.000		252.000.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	6	252.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				21.000.000		21.000.000		21.000.000		63.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	2172	21.000.000	2172	21.000.000	2172	21.000.000	6516	63.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		5.400.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	36	5.400.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				77.000.000		77.000.000		77.000.000		231.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	3	231.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				72.000.000		72.000.000		72.000.000		216.000.000		
										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	3	216.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***						7.894.160.000		4.438.940.000		4.019.440.000		16.352.540.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***			Unit	615	7.894.160.000	211	4.438.940.000	182	4.019.440.000	1008	16.352.540.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				3.070.360.000		3.070.360.000		3.070.360.000		9.211.080.000		
										Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	27	3.070.360.000	27	3.070.360.000	27	3.070.360.000	81	9.211.080.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel ****				1.213.540.000		407.040.000		407.040.000		2.027.620.000		
										Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	437	1.213.540.000	110	407.040.000	110	407.040.000	657	2.027.620.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				3.610.260.000		961.540.000		542.040.000		5.113.840.000		
										Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	151	3.610.260.000	74	961.540.000	45	542.040.000	270	5.113.840.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						3.230.878.000		3.532.223.000		3.846.680.000		10.609.781.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***			Laporan	50	3.230.878.000	50	3.532.223.000	50	3.846.680.000	150	10.609.781.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				24.000.000		24.000.000		24.000.000		72.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	36	72.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		3.600.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	1.100.000.000	12	1.200.000.000	12	1.300.000.000	36	3.600.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				2.106.878.000		2.308.223.000		2.522.680.000		6.937.781.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	26	2.106.878.000	26	2.308.223.000	26	2.522.680.000	78	6.937.781.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						2.483.600.000		2.433.600.000		2.433.600.000		7.350.800.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	439	2.483.600.000	444	2.433.600.000	449	2.433.600.000	1332	7.350.800.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				1.233.600.000	1.233.600.000	1.233.600.000		3.700.800.000				
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	30	1.233.600.000	30	1.233.600.000	30	1.233.600.000	90	3.700.800.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				600.000.000	600.000.000	600.000.000		1.800.000.000				
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	3	1.800.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				650.000.000	600.000.000	600.000.000		1.850.000.000				
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	408	650.000.000	413	600.000.000	418	600.000.000	1239	1.850.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	1.140.950.000	100	1.225.270.000	100	1.310.646.000	100	3.676.866.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						292.500.000	314.500.000	335.500.000		942.500.000				
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	292.500.000	100	314.500.000	100	335.500.000	100	942.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				10.000.000	11.000.000	12.000.000		33.000.000				
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	3	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				48.000.000	52.000.000	56.000.000		156.000.000				
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	48.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000	3	156.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				18.000.000	20.000.000	22.000.000		60.000.000				
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				39.000.000	41.000.000	43.000.000		123.000.000				
									Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	39.000.000	2	41.000.000	2	43.000.000	6	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				2.500.000	2.500.000	2.500.000		7.500.000				
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	336	2.500.000	336	2.500.000	336	2.500.000	1008	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				175.000.000	188.000.000	200.000.000		563.000.000				
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	175.000.000	12	188.000.000	12	200.000.000	36	563.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						476.244.000		524.270.000		576.996.000		1.577.510.000		
							Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***				Laporan	26	476.244.000	26	524.270.000	26	576.996.000	78	1.577.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				6.000.000		7.000.000		8.000.000		21.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	36	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				93.000.000		102.300.000		112.530.000		307.830.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	12	93.000.000	12	102.300.000	12	112.530.000	36	307.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				377.244.000		414.970.000		456.466.000		1.248.680.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	2	377.244.000	2	414.970.000	2	456.466.000	6	1.248.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						372.206.000		386.500.000		398.150.000		1.156.856.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***				Unit	34	372.206.000	36	386.500.000	38	398.150.000	108	1.156.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				127.206.000		140.000.000		150.000.000		417.206.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****		Unit	6	127.206.000	6	140.000.000	6	150.000.000	18	417.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	6	690.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				15.000.000		16.500.000		18.150.000		49.650.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	26	15.000.000	28	16.500.000	30	18.150.000	84	49.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **				%	100	1.881.355.000	100	1.466.860.000	100	1.562.501.000	100	4.910.716.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						254.388.000		274.181.000		296.517.000		825.086.000		
									Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***		%	100	254.388.000	100	274.181.000	100	296.517.000	100	825.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				7.128.000		7.699.000		8.315.000		23.142.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	7.128.000	1	7.699.000	1	8.315.000	3	23.142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				33.480.000		36.159.000		39.052.000		108.691.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	33.480.000	1	36.159.000	1	39.052.000	3	108.691.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				10.800.000		11.664.000		12.598.000		35.062.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	10.800.000	1	11.664.000	1	12.598.000	3	35.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				33.480.000		36.159.000		39.052.000		108.691.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	33.480.000	2	36.159.000	2	39.052.000	6	108.691.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ***				2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	2016	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				167.000.000		180.000.000		195.000.000		542.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	167.000.000	12	180.000.000	12	195.000.000	36	542.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				558.087.000		610.288.000		669.001.000		1.837.376.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	558.087.000	26	610.288.000	26	669.001.000	78	1.837.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				5.400.000		5.832.000		6.299.000		17.531.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	5.400.000	12	5.832.000	12	6.299.000	36	17.531.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				105.000.000		112.000.000		121.000.000		338.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	105.000.000	12	112.000.000	12	121.000.000	36	338.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				447.687.000		492.456.000		541.702.000		1.481.845.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	447.687.000	2	492.456.000	2	541.702.000	6	1.481.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				1.068.880.000		582.391.000		596.983.000		2.248.254.000		
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	93	1.068.880.000	93	582.391.000	95	596.983.000	281	2.248.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				129.600.000		139.968.000		151.166.000		420.734.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	6	129.600.000	6	139.968.000	6	151.166.000	18	420.734.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				900.000.000		400.000.000		400.000.000		1.700.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	3	900.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				39.280.000		42.423.000		45.817.000		127.520.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	84	39.280.000	86	42.423.000	88	45.817.000	258	127.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	2.312.540.000	100	2.411.880.000	100	2.636.100.000	100	7.360.520.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						344.000.000		373.000.000		404.000.000		1.121.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	344.000.000	100	373.000.000	100	404.000.000	100	1.121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				12.500.000		14.000.000		15.500.000		42.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	12.500.000	1	14.000.000	1	15.500.000	3	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				52.000.000		57.500.000		63.500.000		173.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	52.000.000	1	57.500.000	1	63.500.000	3	173.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				14.000.000		16.000.000		18.000.000		48.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	3	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				43.500.000		48.000.000		53.000.000		144.500.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	43.500.000	2	48.000.000	2	53.000.000	6	144.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	672	6.000.000	672	6.000.000	672	6.000.000	2016	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				216.000.000		231.500.000		248.000.000		695.500.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	216.000.000	12	231.500.000	12	248.000.000	36	695.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						1.089.000.000		1.187.200.000		1.305.420.000		3.581.620.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***			Laporan	26	1.089.000.000	26	1.187.200.000	26	1.305.420.000	78	3.581.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				6.000.000		7.000.000		8.000.000		21.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	36	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****			181.000.000	12	188.000.000		206.000.000		575.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	181.000.000	12	188.000.000	12	206.000.000	36	575.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****			902.000.000		992.200.000		1.091.420.000		2.985.620.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	902.000.000	2	992.200.000	2	1.091.420.000	6	2.985.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			879.540.000		851.680.000		926.680.000		2.657.900.000		
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	66	879.540.000	67	851.680.000	70	926.680.000	203	2.657.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****			155.000.000		170.000.000		187.000.000		512.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	10	155.000.000	10	170.000.000	10	187.000.000	30	512.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			650.680.000		600.680.000		650.680.000		1.902.040.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	8	650.680.000	7	600.680.000	8	650.680.000	23	1.902.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			73.860.000		81.000.000		89.000.000		243.860.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	48	73.860.000	50	81.000.000	52	89.000.000	150	243.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP; OPD Provinsi
										Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **			1.985.207.000	100	1.673.028.000	100	1.784.260.000	100	5.442.495.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				X.XX.01.1.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah ***			217.300.000		235.330.000		256.093.000		708.723.000		
										Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			217.300.000	100	235.330.000	100	256.093.000	100	708.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****			8.800.000		9.680.000		10.648.000		29.128.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	8.800.000	1	9.680.000	1	10.648.000	3	29.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****			60.500.000		66.550.000		73.205.000		200.255.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	3	200.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****			16.500.000		18.150.000		19.965.000		54.615.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	3	54.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****			27.500.000		30.250.000		33.275.000		91.025.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	6	91.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****			4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	384	4.000.000	384	4.000.000	384	4.000.000	1152	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****			100.000.000		106.700.000		115.000.000		321.700.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	100.000.000	12	106.700.000	12	115.000.000	36	321.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			670.602.000		723.663.000		795.729.000		2.189.994.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	670.602.000	26	723.663.000	26	795.729.000	78	2.189.994.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****			8.000.000		8.800.000		9.680.000		26.480.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	8.000.000	12	8.800.000	12	9.680.000	36	26.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****			170.000.000		173.000.000		190.000.000		533.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	170.000.000	12	173.000.000	12	190.000.000	36	533.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****			492.602.000		541.863.000		596.049.000		1.630.514.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	492.602.000	2	541.863.000	2	596.049.000	6	1.630.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			1.097.305.000		714.035.000		732.438.000		2.543.778.000		
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	45	1.097.305.000	46	714.035.000	48	732.438.000	139	2.543.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****			150.805.000		165.885.000		182.473.000		499.163.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	9	150.805.000	9	165.885.000	9	182.473.000	27	499.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			900.000.000		500.000.000		500.000.000		1.900.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	6	900.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	16	1.900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				46.500.000		48.150.000		49.965.000		144.615.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	30	46.500.000	32	48.150.000	34	49.965.000	96	144.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	1.871.500.000	100	1.991.250.000	100	2.114.000.000	100	5.976.750.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						315.000.000		349.000.000		383.000.000		1.047.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	315.000.000	100	349.000.000	100	383.000.000	100	1.047.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				12.000.000		13.500.000		15.000.000		40.500.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	12.000.000	1	13.500.000	1	15.000.000	3	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				45.000.000		50.000.000		55.000.000		150.000.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				20.000.000		22.500.000		25.000.000		67.500.000		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	3	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****				30.000.000		35.000.000		40.000.000		105.000.000		
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	6	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	702	8.000.000	702	8.000.000	702	8.000.000	2106	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				200.000.000		220.000.000		240.000.000		660.000.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	200.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	36	660.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				624.500.000		686.750.000		756.000.000		2.067.250.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	624.500.000	26	686.750.000	26	756.000.000	78	2.067.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				3.500.000		3.750.000		4.000.000		11.250.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	3.500.000	12	3.750.000	12	4.000.000	36	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				100.000.000		110.000.000		121.000.000		331.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	36	331.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO	
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				521.000.000		573.000.000		631.000.000		1.725.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	521.000.000	2	573.000.000	2	631.000.000	6	1.725.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						932.000.000		955.500.000		975.000.000		2.862.500.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	64	932.000.000	66	955.500.000	68	975.000.000	198	2.862.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****			107.000.000		118.000.000		130.000.000		355.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	12	107.000.000	12	118.000.000	12	130.000.000	36	355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO
				X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			750.000.000		750.000.000		750.000.000		2.250.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	30	2.250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO
				X.XX.01.1.09.10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			75.000.000		87.500.000		95.000.000		257.500.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	42	75.000.000	45	87.500.000	47	95.000.000	134	257.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG; OPD Provinsi; PURWOREJO
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **				%	100	1.248.432.000	100	1.183.876.000	100	1.273.264.000	100	3.705.572.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						226.500.000		247.500.000		269.500.000		743.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	226.500.000	100	247.500.000	100	269.500.000	100	743.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****			14.500.000		16.000.000		17.000.000		47.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	14.500.000	1	16.000.000	1	17.000.000	3	47.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****			34.500.000		37.000.000		40.000.000		111.500.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	34.500.000	1	37.000.000	1	40.000.000	3	111.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.06.03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****			12.000.000		13.000.000		14.000.000		39.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	3	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****			33.000.000		36.000.000		39.000.000		108.000.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000	6	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.06.06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****			2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	2016	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****			130.000.000		143.000.000		157.000.000		430.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	130.000.000	12	143.000.000	12	157.000.000	36	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			446.332.000		490.716.000		539.538.000		1.476.586.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	446.332.000	26	490.716.000	26	539.538.000	78	1.476.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****			2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	36	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.08.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****			70.000.000		77.000.000		84.700.000		231.700.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	70.000.000	12	77.000.000	12	84.700.000	36	231.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.08.04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****			373.832.000		411.216.000		452.338.000		1.237.386.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	373.832.000	2	411.216.000	2	452.338.000	6	1.237.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			575.600.000		445.660.000		464.226.000		1.485.486.000		
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	40	575.600.000	42	445.660.000	44	464.226.000	126	1.485.486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****			150.600.000		165.660.000		182.226.000		498.486.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	8	150.600.000	8	165.660.000	8	182.226.000	24	498.486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			380.000.000		250.000.000		250.000.000		880.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	380.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	880.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				X.XX.01.1.09.10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			45.000.000		30.000.000		32.000.000		107.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	30	45.000.000	32	30.000.000	34	32.000.000	96	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
										Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	1.645.051.000	100	1.721.277.000	100	1.851.935.000	100	5.218.263.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				X.XX.01.1.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah ***			314.800.000		335.700.000		353.500.000		1.004.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	314.800.000	100	335.700.000	100	353.500.000	100	1.004.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				24.000.000		28.000.000		30.000.000		82.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	24.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	3	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				60.000.000		64.000.000		66.000.000		190.000.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	60.000.000	1	64.000.000	1	66.000.000	3	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				26.000.000		28.000.000		30.000.000		84.000.000		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	26.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	3	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				20.000.000		22.000.000		24.000.000		66.000.000		
									Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.000.000	6	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000		
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	720	3.500.000	720	3.500.000	720	3.500.000	2160	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				181.300.000		190.200.000		200.000.000		571.500.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	12	181.300.000	12	190.200.000	12	200.000.000	36	571.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					760.251.000		835.577.000		918.435.000		2.514.263.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	26	760.251.000	26	835.577.000	26	918.435.000	78	2.514.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	36	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				114.600.000		126.060.000		138.666.000		379.326.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	12	114.600.000	12	126.060.000	12	138.666.000	36	379.326.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				638.651.000		702.517.000		772.769.000		2.113.937.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	2	638.651.000	2	702.517.000	2	772.769.000	6	2.113.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					570.000.000		550.000.000		580.000.000		1.700.000.000		
									Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	36	570.000.000	38	550.000.000	40	580.000.000	114	1.700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				140.000.000		160.000.000		180.000.000		480.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	6	140.000.000	6	160.000.000	6	180.000.000	18	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			400.000.000		350.000.000		350.000.000		1.100.000.000			
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	400.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	6	1.100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI	
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			30.000.000		40.000.000		50.000.000		120.000.000			
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	28	30.000.000	30	40.000.000	32	50.000.000	90	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	2.383.554.000	100	2.548.811.000	100	2.741.041.000	100	7.673.406.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						321.000.000		355.500.000		393.000.000		1.069.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	321.000.000	100	355.500.000	100	393.000.000	100	1.069.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****			13.000.000		14.500.000		16.000.000		43.500.000			
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	13.000.000	1	14.500.000	1	16.000.000	3	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****			55.000.000		61.000.000		68.000.000		184.000.000			
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	55.000.000	1	61.000.000	1	68.000.000	3	184.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****			16.000.000		18.000.000		20.000.000		54.000.000			
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	3	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****			45.000.000		50.000.000		55.000.000		150.000.000			
									Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	6	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****			2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000			
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	336	2.000.000	336	2.000.000	336	2.000.000	1008	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****			190.000.000		210.000.000		232.000.000		632.000.000			
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	190.000.000	12	210.000.000	12	232.000.000	36	632.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.209.694.000		1.331.165.000		1.464.681.000		4.005.540.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024		2025		2026		Target	Rp			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***			Laporan	26	1.209.694.000	26	1.331.165.000	26	1.464.681.000	78	4.005.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				5.000.000		6.000.000		7.000.000		18.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	36	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				220.000.000		242.000.000		266.200.000		728.200.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	36	728.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				984.694.000		1.083.165.000		1.191.481.000		3.259.340.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	984.694.000	2	1.083.165.000	2	1.191.481.000	6	3.259.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					852.860.000		862.146.000		883.360.000		2.598.366.000			
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	47	852.860.000	49	862.146.000	51	883.360.000	147	2.598.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				125.300.000		137.830.000		151.613.000		414.743.000			
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	7	125.300.000	7	137.830.000	7	151.613.000	21	414.743.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				660.000.000		650.000.000		650.000.000		1.960.000.000			
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	4	660.000.000	4	650.000.000	4	650.000.000	12	1.960.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				67.560.000		74.316.000		81.747.000		223.623.000			
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	36	67.560.000	38	74.316.000	40	81.747.000	114	223.623.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	GROBOGAN; OPD Provinsi	
								Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **			%	100	1.688.698.000	100	1.941.773.000	100	2.000.009.000	100	5.630.480.000	Balai Pengujian dan Peralatan		
				X.XX.01.1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					207.500.000		297.500.000		232.500.000		737.500.000			
										Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***		%	100	207.500.000	100	297.500.000	100	232.500.000	100	737.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000			
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG	
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
													25.000.000	100.000.000	25.000.000		150.000.000				
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	25.000.000	1	100.000.000	1	25.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
													10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000				
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
													2.500.000	2.500.000	2.500.000		7.500.000				
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	2016	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
													100.000.000	110.000.000	120.000.000		330.000.000				
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	36	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				1.220.098.000	1.329.893.000	1.450.071.000		4.000.062.000				
										Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	1.220.098.000	26	1.329.893.000	26	1.450.071.000	78	4.000.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				2.750.000	2.750.000	2.750.000		8.250.000				
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	2.750.000	12	2.750.000	12	2.750.000	36	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				238.800.000	250.740.000	263.277.000		752.817.000				
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	238.800.000	12	250.740.000	12	263.277.000	36	752.817.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				978.548.000	1.076.403.000	1.184.044.000		3.238.995.000				
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	978.548.000	2	1.076.403.000	2	1.184.044.000	6	3.238.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				261.100.000	314.380.000	317.438.000		892.918.000				
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	51	261.100.000	53	314.380.000	55	317.438.000	159	892.918.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				133.300.000	133.800.000	133.800.000		400.900.000				
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	11	133.300.000	11	133.800.000	11	133.800.000	33	400.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				100.000.000	100.000.000	100.000.000		300.000.000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				27.800.000		80.580.000		83.638.000		192.018.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	38	27.800.000	40	80.580.000	42	83.638.000	120	192.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	840.217.000	100	913.574.000	100	993.605.000	100	2.747.396.000	Balai Jasa Konstruksi	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						139.500.000		153.300.000		168.200.000		461.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	139.500.000	100	153.300.000	100	168.200.000	100	461.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				8.400.000		9.300.000		10.200.000		27.900.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	8.400.000	1	9.300.000	1	10.200.000	3	27.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				35.000.000		38.600.000		42.400.000		116.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	35.000.000	1	38.600.000	1	42.400.000	3	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				8.400.000		9.300.000		10.200.000		27.900.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	8.400.000	1	9.300.000	1	10.200.000	3	27.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				2.600.000		2.900.000		3.200.000		8.700.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	2.600.000	2	2.900.000	2	3.200.000	6	8.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	672	3.500.000	672	3.500.000	672	3.500.000	2016	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				81.600.000		89.700.000		98.700.000		270.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	81.600.000	12	89.700.000	12	98.700.000	36	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					525.717.000		578.274.000		636.405.000		1.740.396.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	26	525.717.000	26	578.274.000	26	636.405.000	78	1.740.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	36	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				85.200.000		94.000.000		104.000.000		283.200.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	85.200.000	12	94.000.000	12	104.000.000	36	283.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				438.917.000		482.674.000		530.805.000		1.452.396.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	2	438.917.000	2	482.674.000	2	530.805.000	6	1.452.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						175.000.000		182.000.000		189.000.000		546.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	44	175.000.000	46	182.000.000	48	189.000.000	138	546.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				50.000.000		55.000.000		60.000.000		165.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya *****	Unit	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	12	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				25.000.000		27.000.000		29.000.000		81.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	39	25.000.000	41	27.000.000	43	29.000.000	123	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah *											650.000.000		650.000.000		748.000.000		2.048.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			Indeks Manajemen Risiko *								Angka	3,1	650.000.000	3,11	650.000.000	3,12	748.000.000	3,12	2.048.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								650.000.000		650.000.000		748.000.000		2.048.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **					%	100	650.000.000	100	650.000.000	100	748.000.000	100	2.048.000.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***						650.000.000		650.000.000		748.000.000		2.048.000.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***			%	100	650.000.000	100	650.000.000	100	748.000.000	100	2.048.000.000	SUBBAG PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				380.000.000		380.000.000		478.000.000		1.238.000.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	21	380.000.000	21	380.000.000	21	478.000.000	63	1.238.000.000	SUBBAG PROGRAM	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				270.000.000		270.000.000		270.000.000		810.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; BREBES; CILACAP; KEBUMEN; MAGELANG; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOSOBO
				1.03.10.1.01.09						Rehabilitasi Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
				1.03.10.1.01.10						Pemeliharaan Berkala Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
				1.03.10.1.01.12						Pembangunan Jembatan ****											
										Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat ****	m	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
				1.03.10.1.01.16						Penggantian Jembatan ****			25.090.000.000		5.893.600.000		37.339.111.000		68.322.711.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat ****	m	43,6	25.090.000.000	194	5.893.600.000	234	37.339.111.000	471,6	68.322.711.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur **														Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				1.03.10.1.01						Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***			139.557.780.000		39.173.298.000		161.115.115.000		339.846.193.000		
										Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur ***	Km	11,5	139.557.780.000	4	39.173.298.000	11	161.115.115.000	26,5	339.846.193.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
				1.03.10.1.01.05						Pembangunan Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
				1.03.10.1.01.06						Pelebaran Jalan Menuju Standar ****			106.407.780.000		39.173.298.000		126.035.115.000		271.616.193.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur ****	Km	11,5	106.407.780.000	4	39.173.298.000	11	126.035.115.000	26,5	271.616.193.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; BLORA; BOYOLALI; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KENDAL; KLATEN; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KUDUS; PATI; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI
				1.03.10.1.01.08						Rekonstruksi Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; BLORA; BOYOLALI; DEMAK; GROBOGAN; KARANGANYAR; KENDAL; KLATEN; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KUDUS; PATI; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI
				1.03.10.1.01.09						Rehabilitasi Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
				1.03.10.1.01.10						Pemeliharaan Berkala Jalan ****											
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
				1.03.10.1.01.12						Pembangunan Jembatan ****											
										Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur ****	m	70	-	0	-	121	-	191	-	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
				1.03.10.1.01.16						Penggantian Jembatan ****			33.150.000.000		-		35.080.000.000		68.230.000.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur ****	m	70,2	33.150.000.000	0	-	121	35.080.000.000	191,2	68.230.000.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; GROBOGAN
						Persentase panjang jalan yang dileger **							75,79	583.380.000	87,42	628.200.000	100	670.880.000	100	1.882.460.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						583.380.000		628.200.000		670.880.000		1.882.460.000		
							Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N ***				Km	1386,03	583.380.000	1585,43	628.200.000	1792,37	670.880.000	4763,83	1.882.460.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
				1.03.10.1.01.03					Pengelolaan Leger Jalan ****				583.380.000		628.200.000		670.880.000		1.882.460.000		
										Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan ****	Dokumen	8	583.380.000	14	628.200.000	14	670.880.000	36	1.882.460.000	SEKSI RANCANG BANGUN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG
							Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan **				%	47,47	51.863.953.000	72,22	22.767.113.000	100	39.912.901.000	100	114.543.967.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						51.863.953.000		22.767.113.000		39.912.901.000		114.543.967.000		
							Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia ***				Unit	152	51.863.953.000	109	22.767.113.000	116	39.912.901.000	377	114.543.967.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
				1.03.10.1.01.11					Pemeliharaan Rutin Jalan ****				51.863.953.000		22.767.113.000		39.912.901.000		114.543.967.000		
										Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah ****	Unit	94	40.922.000.000	49	15.780.000.000	55	28.880.000.000	198	85.582.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG
										Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara ****	Unit	58	1.866.953.000	60	1.912.113.000	61	1.957.901.000	179	5.736.967.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG
										Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus ****	Unit	5577	9.075.000.000	5575	5.075.000.000	5577	9.075.000.000	16729	23.225.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG
							Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan **				%	100	65.614.236.000	100	18.727.608.000	100	33.264.165.000	100	117.606.009.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						65.614.236.000		18.727.608.000		33.264.165.000		117.606.009.000		
							Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah ***				Dokumen	10	34.059.960.000	10	1.693.000.000	10	2.025.000.000	30	37.777.960.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
				1.03.10.1.01.0029					Pelebaran Jembatan				-		-		2.025.000.000		2.025.000.000		
										Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan	m2	0	-	0	-	3.900	2.025.000.000	3.900	2.025.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; PATI, KENDAL
				1.03.10.1.01.0040					Pelebaran Jalan Menuju Standar				34.059.960.000		1.693.000.000		-		35.752.960.000		
										Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	21240	34.059.960.000	1212	1.693.000.000	0	-	22452	35.752.960.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; CILACAP; KOTA SEMARANG; MAGELANG; PEKALONGAN
							Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan ***				Dokumen	13	31.554.276.000	13	17.034.608.000	13	31.239.165.000	39	79.828.049.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
				1.03.10.1.01.0026					Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		9.000.000.000		
										Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	m	0,05	3.000.000.000	0,05	3.000.000.000	0,05	3.000.000.000	0,05	9.000.000.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG
				1.03.10.1.01.0033					Pemeliharaan Rutin Jalan				7.194.685.000		6.319.661.000		7.194.685.000		20.709.031.000		
										Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	0,45	7.194.685.000	0,45	6.319.661.000	0,45	7.194.685.000	0,45	20.709.031.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG
				1.03.10.1.01.0024					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				21.359.591.000		7.714.947.000		21.044.480.000		50.119.018.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) ****	Dokumen	63	21.359.591.000	25	7.714.947.000	71	21.044.480.000	159	50.119.018.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi **					%	31,88	9.355.000.000	65,22	8.467.000.000	100	9.357.474.000	100	27.179.474.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						9.355.000.000		8.467.000.000		9.357.474.000		27.179.474.000		
								Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi ***			Sertifikat	1100	9.355.000.000	1150	8.467.000.000	1200	9.357.474.000	3450	27.179.474.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
				1.03.10.1.01.22				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan ****					9.355.000.000		8.467.000.000		9.357.474.000		27.179.474.000		
								Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan ****		Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG
								Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 ****		Dokumen	2	354.000.000	2	390.000.000	2	429.000.000	6	1.173.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG	
								Jumlah pemeliharaan alat uji ****		Unit	106	204.000.000	112	225.000.000	114	248.000.000	332	677.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG	
								Jumlah penambahan alat uji ****		Unit	6	7.568.000.000	2	6.500.000.000	2	6.500.000.000	10	20.568.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG	
								Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu ****		Orang	60	789.000.000	65	868.000.000	70	1.647.474.000	195	3.304.474.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG	
								Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi ****		Sertifikat	1100	440.000.000	1150	484.000.000	1200	533.000.000	3450	1.457.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; SEMARANG	
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap *											300.526.789.000		225.383.147.000		378.368.000.000		904.277.936.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
			Persentase kondisi jembatan provinsi baik *							%	91,18	35.103.195.000	91,48	21.921.421.000	92,33	45.494.098.000	92,33	102.518.714.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya		
				1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN **								35.103.195.000		21.921.421.000		45.494.098.000		102.518.714.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap **					%	83,65	3.874.160.000	83,7	1.539.746.000	83,75	1.767.361.000	83,75	7.181.267.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						3.874.160.000		1.539.746.000		1.767.361.000		7.181.267.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap ****		m	2871,82	3.874.160.000	2677,82	1.539.746.000	2677,82	1.767.361.000	2677,82	7.181.267.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-				
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Cilacap ****		m	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					2.458.800.000		-		-		2.458.800.000		
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap ****		m	41,1	2.458.800.000	0	-	0	-	41,1	2.458.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA	
				1.03.10.1.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan ****					1.415.360.000		1.539.746.000		1.767.361.000		4.722.467.000		
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap ****		m	2830,72	1.415.360.000	2677,82	1.539.746.000	2677,82	1.767.361.000	2677,82	4.722.467.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang **					%	93,65	1.082.400.000	93,7	1.843.150.000	93,75	2.945.256.000	93,75	5.870.806.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						1.082.400.000		1.843.150.000		2.945.256.000		5.870.806.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang ****		m	2164,8	1.082.400.000	2164,8	1.843.150.000	2164,8	2.945.256.000	2164,8	5.870.806.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-				
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Magelang ****		m	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					-		600.000.000		1.520.976.000		2.120.976.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Magelang ****	m	0	-	2,8	600.000.000	6,8	1.520.976.000	9,6	2.120.976.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
				1.03.10.1.01.19						Pemeliharaan Rutin Jembatan ****			1.082.400.000		1.243.150.000		1.424.280.000		3.749.830.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang ****	m	2164,8	1.082.400.000	2162	1.243.150.000	2158	1.424.280.000	2158	3.749.830.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati **					%	93,82	1.241.475.000	93,87	3.448.958.000	93,92	5.673.995.000	93,92	10.364.428.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						1.241.475.000		3.448.958.000		5.673.995.000		10.364.428.000		
							Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati ***				m	2482,95	1.241.475.000	2482,95	3.448.958.000	2482,95	5.673.995.000	2482,95	10.364.428.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.17						Pelebaran Jembatan ****			-		-		-		-		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pati ****	m	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
				1.03.10.1.01.18						Rehabilitasi Jembatan ****			-		2.025.000.000		4.040.000.000		6.065.000.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati ****	m	0	-	6,5	2.025.000.000	7,2	4.040.000.000	13,7	6.065.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
				1.03.10.1.01.19						Pemeliharaan Rutin Jembatan ****			1.241.475.000		1.423.958.000		1.633.995.000		4.299.428.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati ****	m	2482,95	1.241.475.000	2476,45	1.423.958.000	2475,75	1.633.995.000	2475,75	4.299.428.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan **					%	88,49	10.639.060.000	88,54	1.670.386.000	88,59	4.849.691.000	88,59	17.159.137.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						10.639.060.000		1.670.386.000		4.849.691.000		17.159.137.000		
							Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan ***				m	2905,02	10.639.060.000	2905,02	1.670.386.000	2905,02	4.849.691.000	2905,02	17.159.137.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.17						Pelebaran Jembatan ****			-		-		-		-		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pekalongan ****	m	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
				1.03.10.1.01.18						Rehabilitasi Jembatan ****			7.200.000.000		-		2.950.000.000		10.150.000.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan ****	m	26,9	7.200.000.000	0	-	26,7	2.950.000.000	53,6	10.150.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
				1.03.10.1.01.19						Pemeliharaan Rutin Jembatan ****			3.439.060.000		1.670.386.000		1.899.691.000		7.009.137.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan ****	m	2878,12	3.439.060.000	2905,02	1.670.386.000	2878,32	1.899.691.000	2878,32	7.009.137.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi **					%	91,18	5.650.590.000	91,23	2.117.253.000	91,28	5.258.242.000	91,28	13.026.085.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						5.650.590.000		2.117.253.000		5.258.242.000		13.026.085.000		
							Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi ***				m	3682,18	5.650.590.000	3682,18	2.117.253.000	3682,18	5.258.242.000	3682,18	13.026.085.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.17						Pelebaran Jembatan ****			-		-		-		-		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Purwodadi ****	m	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.18						Rehabilitasi Jembatan ****			3.825.000.000		-		2.835.462.000		6.660.462.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024		2025		2026		Target	Rp			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi ****	m	31	3.825.000.000	0	-	11,3	2.835.462.000	42,3	6.660.462.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN	
				1.03.10.1.01.19						Pemeliharaan Rutin Jembatan ****			1.825.590.000		2.117.253.000		2.422.780.000		6.365.623.000			
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi ****	m	3651,18	1.825.590.000	3682,18	2.117.253.000	3670,88	2.422.780.000	3670,88	6.365.623.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang **					%	85,51	2.717.375.000	85,56	1.024.621.000	85,61	2.744.487.000	85,61	6.486.483.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang		
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						2.717.375.000		1.024.621.000		2.744.487.000		6.486.483.000			
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang ***			m	1748,95	2.717.375.000	1781,95	1.024.621.000	1781,95	2.744.487.000	1781,95	6.486.483.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-		-			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Semarang ****			m	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					1.850.000.000		-		1.575.000.000		3.425.000.000			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Semarang ****			m	14,2	1.850.000.000	0	-	10	1.575.000.000	24,2	3.425.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan ****					867.375.000		1.024.621.000		1.169.487.000		3.061.483.000			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang ****			m	1734,75	867.375.000	1781,95	1.024.621.000	1771,95	1.169.487.000	1771,95	3.061.483.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta **					%	94,78	4.387.950.000	94,83	6.576.297.000	94,88	8.589.684.000	94,88	19.553.931.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.		
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						4.387.950.000		6.576.297.000		8.589.684.000		19.553.931.000			
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta ***			m	4905,4	4.387.950.000	4942,6	6.576.297.000	4821,6	8.589.684.000	4821,6	19.553.931.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-		-			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Surakarta ****			m	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					1.940.000.000		3.750.000.000		5.430.000.000		11.120.000.000			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Surakarta ****			m	9,5	1.940.000.000	27,3	3.750.000.000	34,2	5.430.000.000	71	11.120.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI	
				1.03.10.1.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan ****					2.447.950.000		2.826.297.000		3.159.684.000		8.433.931.000			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta ****			m	4895,9	2.447.950.000	4915,3	2.826.297.000	4787,4	3.159.684.000	4787,4	8.433.931.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal **					%	86,14	4.019.500.000	86,19	2.698.400.000	86,24	6.878.780.000	86,24	13.596.680.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal		
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						4.019.500.000		2.698.400.000		6.878.780.000		13.596.680.000			
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal ***			m	1997	4.019.500.000	2037	2.698.400.000	1997	6.878.780.000	1997	13.596.680.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1		
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-		-			
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal ****			m	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					3.025.000.000		1.530.000.000		5.570.000.000		10.125.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				1.03.10.1.01.19						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal ****	m	8	3.025.000.000	5	1.530.000.000	14	5.570.000.000	27	10.125.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
										Pemeliharaan Rutin Jembatan ****			994.500.000		1.168.400.000		1.308.780.000		3.471.680.000		
										Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal ****	m	1989	994.500.000	2032	1.168.400.000	1983	1.308.780.000	1983	3.471.680.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo **					%	94,9	1.490.685.000	94,95	1.002.610.000	95	6.786.602.000	95	9.279.897.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						1.490.685.000		1.002.610.000		6.786.602.000		9.279.897.000		
								Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo ****			m	1743,67	1.490.685.000	1743,67	1.002.610.000	1743,67	6.786.602.000	1743,67	9.279.897.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.17				Pelebaran Jembatan ****					-		-		-		-		
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo ****			m	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
				1.03.10.1.01.18				Rehabilitasi Jembatan ****					630.000.000		-		5.680.000.000		6.310.000.000		
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo ****			m	22,3	630.000.000	0	-	67	5.680.000.000	89,3	6.310.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
				1.03.10.1.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan ****					860.685.000		1.002.610.000		1.106.602.000		2.969.897.000		
								Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo ****			m	1721,37	860.685.000	1743,67	1.002.610.000	1676,67	1.106.602.000	1676,67	2.969.897.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
			Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap *								%	93,2	265.423.594.000	93,5	203.461.726.000	94,35	332.873.902.000	94,35	801.759.222.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN **								265.423.594.000		203.461.726.000		332.873.902.000		801.759.222.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap **					%	98,34	23.702.376.000	98,39	19.491.806.000	98,44	30.331.172.000	98,44	73.525.354.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						23.702.376.000		19.491.806.000		30.331.172.000		73.525.354.000		
								Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap ***			Km	203,14	23.702.376.000	205,24	19.491.806.000	198,24	30.331.172.000	198,24	73.525.354.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09				Rehabilitasi Jalan ****					11.430.000.000		4.996.250.000		10.018.750.000		26.445.000.000		
								Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap ****			Km	0,2	1.000.000.000	0	-	0	-	0,2	1.000.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA
								Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap ****			Km	6,65	10.430.000.000	2,85	4.996.250.000	5	10.018.750.000	14,5	25.445.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA
								Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap ****			Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; CILACAP; PURBALINGGA
				1.03.10.1.01.11				Pemeliharaan Rutin Jalan ****					12.272.376.000		14.495.556.000		20.312.422.000		47.080.354.000		
								Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap ****			Km	196,49	12.272.376.000	202,39	14.495.556.000	198,24	20.312.422.000	198,24	47.080.354.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang **					%	95,54	34.938.800.000	95,59	18.279.720.000	95,64	37.675.395.000	95,64	90.893.915.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						34.938.800.000		18.279.720.000		37.675.395.000		90.893.915.000		
								Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang ***			Km	261,08	34.938.800.000	261,08	18.279.720.000	260,08	37.675.395.000	260,08	90.893.915.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09				Rehabilitasi Jalan ****					19.600.000.000		-		16.885.750.000		36.485.750.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang ****	Km	11,1	19.600.000.000	0	-	7	13.976.250.000	18,1	33.576.250.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang ****	Km	0	-	0	-	1,1	2.909.500.000	1,1	2.909.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
				1.03.10.1.01.11						Pemeliharaan Rutin Jalan ****			15.338.800.000		18.279.720.000		20.789.645.000		54.408.165.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang ****	Km	249,98	15.338.800.000	261,08	18.279.720.000	253,08	20.789.645.000	253,08	54.408.165.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; MAGELANG; PURWOREJO
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati **					%	91,94	28.231.600.000	91,99	22.207.440.000	92,04	35.034.631.000	92,04	85.473.671.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						28.231.600.000		22.207.440.000		35.034.631.000		85.473.671.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati ***				Km	246,26	28.231.600.000	248,26	22.207.440.000	248,26	35.034.631.000	248,26	85.473.671.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09						Rehabilitasi Jalan ****			13.600.000.000		5.250.000.000		15.970.000.000		34.820.000.000		
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati ****	Km	7,4	13.600.000.000	2,5	5.250.000.000	8	15.970.000.000	17,9	34.820.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
				1.03.10.1.01.11						Pemeliharaan Rutin Jalan ****			14.631.600.000		16.957.440.000		19.064.631.000		50.653.671.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati ****	Km	238,86	14.631.600.000	245,76	16.957.440.000	240,26	19.064.631.000	240,26	50.653.671.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan **					%	95,76	24.572.600.000	95,81	22.555.040.000	95,86	40.489.188.000	95,86	87.616.828.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						24.572.600.000		22.555.040.000		40.489.188.000		87.616.828.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan ***				Km	252,96	24.572.600.000	254,16	22.555.040.000	252,56	40.489.188.000	252,56	87.616.828.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09						Rehabilitasi Jalan ****			9.755.000.000		5.225.000.000		21.088.075.000		36.068.075.000		
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan ****	Km	6	9.755.000.000	3	5.225.000.000	10,58	21.088.075.000	19,58	36.068.075.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
				1.03.10.1.01.11						Pemeliharaan Rutin Jalan ****			14.817.600.000		17.330.040.000		19.401.113.000		51.548.753.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan ****	Km	246,96	14.817.600.000	251,16	17.330.040.000	241,98	19.401.113.000	241,98	51.548.753.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi **					%	80,66	33.601.400.000	80,71	27.815.610.000	80,76	45.739.476.000	80,76	107.156.486.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						33.601.400.000		27.815.610.000		45.739.476.000		107.156.486.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				1.03.10.1.01.09				Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi ***			Km	375,19	33.601.400.000	378,69	27.815.610.000	377,69	45.739.476.000	377,69	107.156.486.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
									Rehabilitasi Jalan ****				11.300.000.000		1.755.000.000		16.047.500.000		29.102.500.000		
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi ****	Km	3,5	11.300.000.000	1	1.755.000.000	3,5	16.047.500.000	8	29.102.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN
				1.03.10.1.01.11					Pemeliharaan Rutin Jalan ****				22.301.400.000		26.060.610.000		29.691.976.000		78.053.986.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi ****	Km	371,69	22.301.400.000	377,69	26.060.610.000	374,19	29.691.976.000	374,19	78.053.986.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; GROBOGAN; SRAGEN
								Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang **			%	96,11	25.769.800.000	96,16	20.130.420.000	96,21	28.646.922.000	96,21	74.547.142.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				1.03.10.1.01					Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***				25.769.800.000		20.130.420.000		28.646.922.000		74.547.142.000		
										Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang ***	Km	221,88	25.769.800.000	225,18	20.130.420.000	223,18	28.646.922.000	223,18	74.547.142.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09					Rehabilitasi Jalan ****				12.310.000.000		4.800.000.000		11.322.437.000		28.432.437.000		
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang ****	Km	0,05	4.000.000.000	0	-	0,25	431.250.000	0,3	4.431.250.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; KOTA SEMARANG; SEMARANG
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang ****	Km	2,55	8.310.000.000	2	3.500.000.000	4,85	9.741.187.000	9,4	21.551.187.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; KOTA SEMARANG; SEMARANG
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang ****	Km	0	-	0,7	1.300.000.000	0,5	1.150.000.000	1,2	2.450.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; KOTA SEMARANG; SEMARANG
				1.03.10.1.01.11					Pemeliharaan Rutin Jalan ****				13.459.800.000		15.330.420.000		17.324.485.000		46.114.705.000		
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang ****	Km	219,33	13.459.800.000	222,18	15.330.420.000	218,33	17.324.485.000	218,33	46.114.705.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
								Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta **			%	93,97	42.161.600.000	94,02	33.235.590.000	94,07	50.273.128.000	94,07	125.670.318.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				1.03.10.1.01					Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***				42.161.600.000		33.235.590.000		50.273.128.000		125.670.318.000		
										Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta ***	Km	410,11	42.161.600.000	414,61	33.235.590.000	408,11	50.273.128.000	408,11	125.670.318.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09					Rehabilitasi Jalan ****				17.300.000.000		3.800.000.000		18.003.750.000		39.103.750.000		
										Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI
										Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta ****	Km	5,75	17.300.000.000	2,5	3.800.000.000	9	18.003.750.000	17,25	39.103.750.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI
										Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta ****	Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI
				1.03.10.1.01.11					Pemeliharaan Rutin Jalan ****				24.861.600.000		29.435.590.000		32.269.378.000		86.566.568.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta ****	Km	404,36	24.861.600.000	412,11	29.435.590.000	399,11	32.269.378.000	399,11	86.566.568.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SUKOHARJO; WONOGIRI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal **					%	96,51	26.833.818.000	96,56	17.157.460.000	96,61	34.636.479.000	96,61	78.627.757.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						26.833.818.000		17.157.460.000		34.636.479.000		78.627.757.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal ***				Km	200,84	26.833.818.000	201,84	17.157.460.000	201,84	34.636.479.000	201,84	78.627.757.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09				Rehabilitasi Jalan ****					15.125.418.000		3.265.000.000		17.886.250.000		36.276.668.000		
							Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal ****				Km	0,25	1.925.000.000	0	-	0	-	0,25	1.925.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal ****				Km	5,7	12.600.418.000	0,5	1.540.000.000	6,5	17.886.250.000	12,7	32.026.668.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
							Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal ****				Km	0,2	600.000.000	0,5	1.725.000.000	0	-	0,7	2.325.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
				1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan ****						11.708.400.000		13.892.460.000		16.750.229.000		42.351.089.000		
							Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal ****				Km	195,14	11.708.400.000	201,34	13.892.460.000	195,34	16.750.229.000	195,34	42.351.089.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; TEGAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo **					%	91,97	25.611.600.000	92,02	22.588.640.000	92,07	30.047.511.000	92,07	78.247.751.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				1.03.10.1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi ***						25.611.600.000		22.588.640.000		30.047.511.000		78.247.751.000		
							Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo ***				Km	247,36	25.611.600.000	248,56	22.588.640.000	245,06	30.047.511.000	245,06	78.247.751.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
				1.03.10.1.01.09				Rehabilitasi Jalan ****					10.590.000.000		5.245.000.000		9.998.750.000		25.833.750.000		
							Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo ****				Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo ****				Km	7	10.590.000.000	3	5.245.000.000	5	9.998.750.000	15	25.833.750.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
							Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo ****				Km	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO
				1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan ****						15.021.600.000		17.343.640.000		20.048.761.000		52.414.001.000		
							Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo ****				Km	240,36	15.021.600.000	245,56	17.343.640.000	240,06	20.048.761.000	240,06	52.414.001.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; WONOSOBO

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perangkat daerah pada dasarnya merupakan pelaksana teknis dalam rangka mewujudkan kinerja bidang urusan berkenaan. Sebagaimana diketahui, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengampu tiga bidang urusan sekaligus, yaitu: bidang urusan kebinamargaan, keciptakaryaan, dan jasa konstruksi. Dalam kaitan itu, rencana strategis dipandang sebagai dokumen yang menjelaskan bagaimana kinerja direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan nantinya dalam suatu sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme perencanaan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	43,50	44,24	45,09	45,39	46,24	46,24
Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	92,49	92,35	93,20	93,50	94,35	94,35
Persentase Kondisi Jembatan Provinsi Baik	%	88,22	90,33	91,18	91,48	92,33	92,33
Persentase Akses Air Minum Aman	%	36,93	38,93	40,93	42,93	44,93	44,93
Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman	%	9,94	10,46	10,97	11,49	12,00	12,00
Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	18,35	30,10	49,42	61,65	72,82	72,82

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai pada tahun 2024 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
		Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase akses air limbah domestik layak	%	93,58	95,18	96,78	96,78
Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54,82	57,82	60,82	60,82
Persentase akses air minum layak	%	92,42	93,94	95,45	95,45
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100	100	100
Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	5,83	5,83	5,83
Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,94	12,23	11,17	11,17
Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	33,33	66,67	100	100
Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43,49	46,98	51,09	51,09
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100

Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
		Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100
Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	100	100	100
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	45,41	45,56	45,8	45,8
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,74	39,89	40,13	40,13
Persentase panjang jalan yang dileger	%	75,79	87,42	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	40,32	69,23	100	100
Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	100	100	100
Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31,88	65,22	100	100
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83,65	83,7	83,75	83,75
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93,65	93,7	93,75	93,75
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93,82	93,87	93,92	93,92
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,49	88,54	88,59	88,59
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,18	91,23	91,28	91,28
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,51	85,56	85,61	85,61
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,78	94,83	94,88	94,88
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86,14	86,19	86,24	86,24
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,9	94,95	95	95
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	98,34	98,39	98,44	98,44
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	95,54	95,59	95,64	95,64
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	91,94	91,99	92,04	92,04
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,76	95,81	95,86	95,86
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	80,66	80,71	80,76	80,76

Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
		Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	96,11	96,16	96,21	96,21
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93,97	94,02	94,07	94,07
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	96,51	96,56	96,61	96,61
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,97	92,02	92,07	92,07

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024-2026

BAB VIII

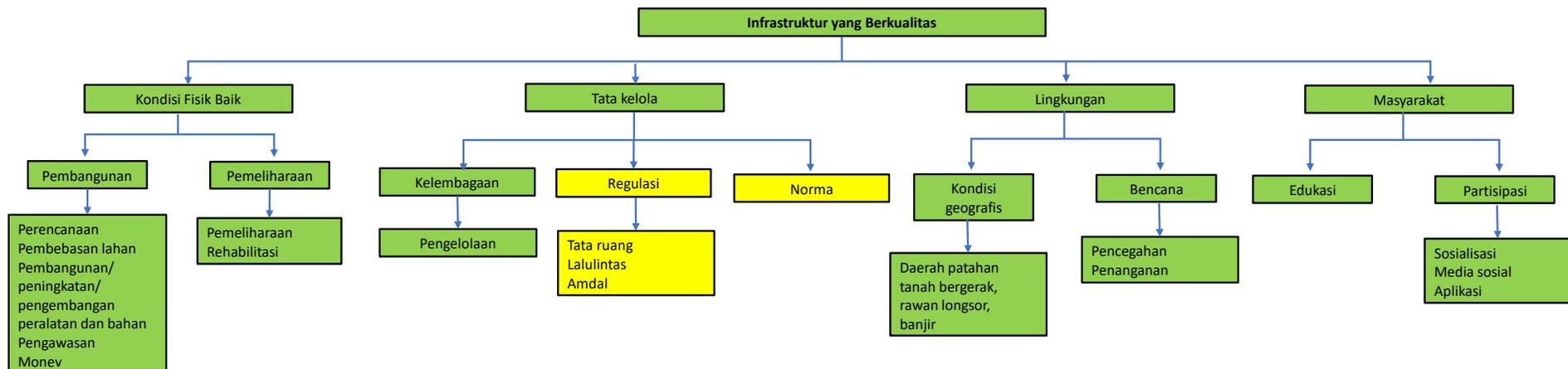
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan kebinamargaan dan keciptakarya serta jasa konstruksi sesuai tantangan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi..

POHON KINERJA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Keterangan
Bukan urusan
Urusan

TUJUAN	
SASARAN	<p>SASARAN Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor</p> <p>IK: Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor</p> <p>Rumus : ((Panjang jalan provinsi sesuai standar Jalan Kolektor th - n / Panjang jalan provinsi seluruhnya) X 100)</p>

	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Barat	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan			Balai Pengujian dan Peralatan	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	IK : Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat Rumus : Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor di wilayah Barat s.d tahun n / Panjang jalan provinsi di wilayah Barat seluruhnya x 100%	IK : Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur Rumus : Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor di wilayah Timur s.d tahun n / Panjang jalan provinsi di wilayah Timur seluruhnya x 100%	Ind 1 = Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan (Jumlah capaian dokumen perencanaan jalan dan jembatan pada tahun n / Jumlah Target dokumen perencanaan jalan dan jembatan pada tahun n) x 100%	Ind 2 = Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (Jumlah capaian dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan + Jumlah capaian dokumen pembebasan lahan)/(Jumlah rencana dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan + Jumlah dokumen pembebasan lahan)x 100%	Ind 3 = Persentase panjang jalan yang dileger (Total panjang jalan yang sudah dileger / Total panjang jalan provinsi seluruhnya) x 100%	Ind 1 = Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (Jumlah kumulatif ketersediaan alat berat s.d tahun n / Jumlah kumulatif target kebutuhan alat berat sampai akhir tahun perencanaan) x 100%	Ind 2 = Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi tahun n / Jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana) x 100%
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Seksi Rancang Bangun	Seksi Pengawasan Teknis	Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan	Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan	Seksi Peralatan
KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat (dalam kilometer)	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur (dalam kilometer)	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (Dokumen)	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (Dokumen)	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (Dokumen)	Panjang Jalan yang dileger (s/d tahun n) Km (s/d tahun n)	Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (unit)
SUB KEGIATAN	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengelolaan Leger Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat (Km)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur (Km)	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan (M2)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (tahun n) (Dokumen)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km) Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (unit) Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (unit) Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus (unit)
	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pelebaran Jembatan		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang) Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat) Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (Unit) Jumlah unit Penambahan alat uji (Unit)
	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat (Km)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur (Km)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana (KM)	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan (M2)		
	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan		Pemeliharaan Rutin Jembatan			
	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat (M)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur (M)		Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana (M)			
	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan					
	Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat (M)	Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur (M)					
	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan					
	Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Barat (Km)	Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur(Km)					
	Pembangunan Flyover	Pembangunan Flyover					
	Panjang Flyover yang Dibangun di Wilayah Barat (M)	Panjang Flyover yang Dibangun di Wilayah Timur (M)					
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan					
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Barat (Km)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur (Km)					
	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan					
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat (Km)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur(Km)					

TUJUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan
IK : Indeks Pelayanan Keciptakaryaan
 Rumus : Rata-rata dari persentase capaian indikator sasaran

SASARAN
Meningkatnya akses air minum aman
IK: Persentase layanan air minum aman

rumus : (Jumlah penduduk dengan akses air minum aman / jumlah penduduk di Jawa Tengah) x 100%

SASARAN
Meningkatnya akses air limbah domestik aman
IK: Persentase layanan air limbah domestik aman

rumus : (Jumlah penduduk dengan akses air limbah domestik aman / jumlah penduduk di Jawa Tengah) x100%

SASARAN
Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah

IK: Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar

Rumus : ((Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun n / Jumlah total Komplek BGMD Prov. Jawa Tengah) x 100%)

Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Balai Jasa Konstruksi

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ind 1 = Persentase akses air minum layak
 (Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mengakses air minum layak/Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah)x100%)

Ind 2 = Persentase akses air minum jaringan perpipaan
 (Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mengakses air minum jaringan perpipaan th-n/Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah)x100%)

Ind 3 = Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota
 ((Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab./Kota) / (Jumlah kebutuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota)x100%)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Ind 1 =Persentase akses air limbah domestik layak
 (Jumlah penduduk yang sudah mempunyai akses air limbah domestik layak / Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah)x100%)

Penataan Bangunan Gedung

Ind 1 :Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah
 ((Jumlah lokasi komplek BGMD yang diberi bantuan teknis / Jumlah total Komplek BGMD Prov. Jawa Tengah)x100%)

Ind 2 :Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis
 Rumus : ((Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n / Jumlah total Komplek BGMD Prov. Jawa Tengah) x 100%)

Pengembangan Jasa Konstruksi

Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi
 Rumus : (Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah Rencana pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya)x100%

Pengembangan Jasa Konstruksi

Persentase Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi
 (Jumlah Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi Bersertifikat Ahli sampai th-n/Jumlah Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi) x 100%

Sekai Air Minum

Sekai Pengembangan Kesehatan Lingkungan

Sekai Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Ind 1. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mengakses air minum layak th-n (Jiwa)
 Ind 2. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mengakses air minum jaringan perpipaan th-n (Jiwa)
 Ind 3. Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab./Kota (Liter/detik)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Kabupaten/KotaPenyelenggaraan Jalan Provinsi

Ind 1 Jumlah penduduk yang sudah mempunyai akses air limbah domestik layak th-n (Jiwa)

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Ind 1 : Jumlah lokasi komplek BGMD yang diberi bantuan teknis pada tahun n (lokasi atau komplek)
 Ind 2 : Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n (komplek)

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dokumen)

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (s.d tahun n) (Orang)

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (kegiatan)

Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (Dokumen)

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)

Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Dokumen)

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (orang)

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)

Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi

Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (Dokumen)
 Jumlah stand pameran yang dilaksanakan (Unit)
 Jumlah pengadaan Buku Konstruksi (Buah)
 Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani (kegiatan)

Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha + Tertib Penyelenggaraan + Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)
 Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik)
 Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)
 Jumlah Dokumen Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n (Dokumen)

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (tahun n)

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI (Orang)

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispm, ded, smdal) (dokumen)
 Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)
 Spam Tematik tertentu (Liter/detik)

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah tangga)
 Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (m3)
 Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (M2)

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat

Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat (Orang)
 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara (Orang)

Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2		4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	Risiko operasional	jalan berada di daerah ekstrem di pinggir jurang, gunung, bukit	Jalan tidak sesuai dengan standar kolektor	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
					Risiko operasional	Masalah pembebasan lahan		
2	Sasaran Strategis	Terjaganya kondisi permukaan jalan mantap	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	Kerusakan jalan diluar perencanaan	Risiko operasional	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
						Pengguna jalan melebihi standar (overload)		
			Persentase kondisi jembatan provinsi baik	Kerusakan jembatan diluar perencanaan	Risiko operasional	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jembatan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
						Pengguna jalan melebihi standar (overload)		
3	Sasaran Strategis	Meningkatkan akses air minum layak termasuk didalamnya aman	Persentase layanan air minum layak termasuk didalamnya aman	Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	Risiko operasional	Adanya alternatif sumber air bersih lain (sumur dangkal)	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, PDAM, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota
4		Meningkatkan akses air limbah domestik layak termasuk didalamnya aman	Persentase layanan air limbah domestik layak termasuk didalamnya aman	Pengolahan air limbah domestik belum optimal	Risiko operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan pengelolaan air limbah domestik yang telah tersedia	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota
5		Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	Risiko operasional	Kurangnya pemahaman peraturan dan standar teknis bangunan gedung	Keselamatan konstruksi	Pengguna Gedung
					Risiko Kebijakan	Peraturan bangunan gedung yang dinamis	Perubahan standar BGMD	Penyelenggara Gedung
					Risiko operasional	Perencanaan yang tidak sesuai standar teknis	Bangunan gedung yang tidak sesuai standar (keselamatan, keamanan, kenyamanan)	Pengguna Gedung
						Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan konstruksi		

Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	3	4	12	Ada	Optimalisasi lahan	Memadai	3	3	9
Kerusakan jalan diluar perencanaan	4	4	16	Ada	Perbaiki kerusakan jalan	Memadai	3	3	9
Kerusakan jembatan diluar perencanaan	3	4	12	Ada	Perbaiki kerusakan jembatan	Memadai	3	3	9
Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	3	3	9	Ada	Pembinaan dan monev	Memadai	2	2	4
Pengolahan air limbah domestik belum optimal	3	3	9	Ada	Bimbingan teknis (bintek) dan monev	Memadai	2	2	4
Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan bantuan teknis (monev)	Memadai	2	2	4

Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	9	Kepala Dinas DPU BMCK	jalan berada di daerah ekstrem di pinggir jurang, gunung, bukit	Jalan tidak sesuai dengan standar kolektor
			Masalah pembebasan lahan	
Kerusakan jalan diluar perencanaan	9	Kepala Dinas DPU BMCK	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat
			Pengguna jalan melebihi standar (overload)	
Kerusakan jembatan diluar perencanaan	9	Kepala Dinas DPU BMCK	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jembatan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat
			Pengguna jalan melebihi standar (overload)	

Tabel Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	9	jalan berada di daerah ekstrem di pinggir jurang, gunung, bukit	Jalan tidak sesuai dengan standar kolektor		Kepala Dinas DPU BMCK	
				Masalah pembebasan lahan				
Terjaganya kondisi permukaan jalan mantap	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	Kerusakan jalan diluar perencanaan	9	Bencana alam dan Cuaca ekstrem	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat		Kepala Dinas DPU BMCK	
				Pengguna jalan melebihi standar (overload)				